

RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko telah dapat diselesaikan sebagai amanat setiap lima tahun setelah Rancangan RPJMD Kabupaten Mukomuko disusun. RENSTRA ini merupakan acuan utama bagi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko untuk melaksanakan program pembangunan di sektor perikanan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 - 2026 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara Umum Penyusunan Rencana Strategis ini juga mempedomani Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, serta Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko. Selain itu Rencana Strategis ini juga fokus pada upaya pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Mukomuko, serta mempertimbangkan Rencana Strategis yang disusun oleh kementerian terkait di pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan juga mengacu pada RTRW dan KLHS Kabupaten Mukomuko.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko ini, kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana dilingkungan Dinas Perikanan dalam melakukan tugasnya. Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat berguna bagi kita semua khususnya seluruh masyarakat Kabupaten Mukomuko. Amin.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Mukomuko



Eddy Aprivanto, SP, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19690417 199710 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penyusunan	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN	
 MUKOMUKO	II-1
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.....	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.....	II-33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	III-19
3.3 Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko.....	III-21
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-23
3.5 Penentuan Isu-isu Stategis.....	III-24

BAB IV	TUJUAN, SASARAN DINAS PERIKANAN	IV-1
4.1	Visi dan Misi Dinas Perikanan	IV-1
4.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Jangka Menengah Dinas Perikanan	IV-2
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021-2026	VI-1
BAB VII	KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP.....	VII-1
8.1	Pedoman Transisi	VIII-1
8.2	Kaidah Pelaksanaan	VIII-2

DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan golongan dan jenis kelamin.....	II-10
2	Tabel 2.2	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	II-11
3	Tabel 2.3	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan.	II-12
4	Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.....	II-15
5	Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 – 2020	II-26
6	Tabel 2.6	Faktor – faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	II-19
7	Tabel 3.1	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran	III-1
8	Tabel 3.2	Jumlah Aparatur Menurut Jabatan	III-3
9	Tabel 3.3	Luas Potensi Perikanan Budidaya Tahun 2016	III-4
10	Tabel 3.4	Pencapaian Poduksi Perikanan Budidaya	III-7
11	Tabel 3.5	Jumlah Unit Pembenihan dan Sarana Yang Dimiliki Serta Permasalahan	III-8
12	Tabel 3.6	Kebutuhan Peralatan Penunjang Pembenihan	III-9
13	Tabel 3.7	Pegawai Yang Memiliki Standar Kompetensi Ilmu Kelautan dan Perikanan	III-9
14	Tabel 3.8	Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Mukomuko	III-10
15	Tabel 3.9	Titik Sentral pendaratan Ikan	III-12
16	Tabel 3.10	Jumlah Armada Tangkap 2012-2016	III-13
17	Tabel 3.11	Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Nelayan tahun 2012-2016	III-14
18	Tabel 3.12	Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Mukomuko	III-15
19	Tabel 3.13	Sarana dan Prasarana Pengolah Hasil Perikanan 2012-2016 ...	III-18
20	Tabel 3.14	Sarana dan Prasarana Pemasar Hasil Perikanan 2017-2020	III-20
21	Tabel 3.15	Perkembangan Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, serta Pengolahan dan Pemasaran Kabupaten Mukomuko	III-20

22	Tabel 3.16	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-22
23	Tabel 3.17	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Berdasarkan Renstra Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pananganannya	III-24
24	Tabel 3.18	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	III-29
25	Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	IV-4
26	Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
27	Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	VII-2
28	Tabel 7.1	Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2021-2026	VII-2

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 2-1	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan	II-11
2	Gambar 2-2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-12
3	Gambar 2-3	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	II-13
4	Gambar 2-4	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	II-28
5	Gambar 3-1	Kebutuhan Sarana Prasarana Penyimpan Aset	III-3
6	Gambar 3-2	Kebutuhan Penambahan ASN	III-4
7	Gambar 3-3	Pembudidaya Ikan yang memiliki Izin	III-5
8	Gambar 3-4	Pembudidaya Ikan yang menggunakan Benih Ikan Unggul (RTP)	III-6
9	Gambar 3-5	Benih Ikan Unggul yang digunakan pembudidaya ikan (ekor)	III-7
10	Gambar 3-6	Pembudidaya Ikan yang terpenuhi kebutuhan pakan ikan sesuai standar (Ton)	III-8
11	Gambar 3-7	Target Produksin Perikanan Budidaya	III-11
12	Gambar 3-8	Penggunaan Alat Tangkap yang dilarang	III-12
13	Gambar 3-9	Target Jumlah Armada Tangkap	III-14
15	Gambar 3-11	Kebutuhan Alat Tangkap	III-15
16	Gambar 3-12	Produksi Perikanan Tanangkap (ton/tahun)	III-16
17	Gambar 3-13	Tingkat Kesadaran Akan Hukum	III-17
18	Gambar 3-14	Jumlah Alat Pengolah Perikanan	III-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, di mana Rencana Strategis ini nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko. Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026. Rencana Strategis disinkronkan dengan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (visi, misi dan program

Bupati terpilih). Dalam penyusunannya melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko. Penyempurnaan Rencana Strategis meliputi visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko ditetapkan oleh Peraturan Bupati Mukomuko. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko disampaikan ke Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 juga menjadi acuan dalam penilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan angka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah No 9 Tahun 2021);

29. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 31).

a. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagai penjabaran teknis operasional dari RPJMD unit kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Mukomuko. Dokumen perencanaan ini mencakup ***Visi, Misi dan Arah Kebijakan Teknis*** dan ***Indikasi Rencana Program Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko*** untuk lima tahun ke depan.

1.3.1. **Maksud**

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko ini ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi pemerintah, masyarakat dan *stakeholders*, maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan 2021 – 2026 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program, prioritas kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;

5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan modern;
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko 2021 – 2026 adalah terjabarnya visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta program kerja Kepala Daerah, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomumuko 5 (lima) Tahun ke depan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko 2021 – 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Perikanan , Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaahan visi misi Bupati terpilih, telaahan RPJMD, telaahan RTRW serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, SASARAN DINAS PERIKANAN

Bab ini menguraikan rumusan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN

Bab ini menguraikan Strategi dan Arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERIKANAN

Bab ini berisikan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko yang mengacu pada RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabuapten Mukomuko

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, serta Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

2.1.1. Tugas Dinas Perikanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten”.

2.1.2. Fungsi Dinas Perikanan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi antara lain:

1. Kepala Dinas, Bertugas :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di

bidang perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati agar dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan perikanan;
 - b. Membantu berdasarkan ketentuan perundang-undangan demi terwujudnya perikanan berkualitas, berakhlak, mulia dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang perikanan;

2. Sekretaris, bertugas :

1. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan perencanaan pembangunan perikanan, penata usaha keuangan , pembinaan organisasi dan kepegawaian, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan program/kegiatan serta administrasi keuangan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan agar berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko; dan
 - c. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.

2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, bertugas:

1. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan dan menganalisa data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program kerja dinas;
- c. Penghimpunan, penganalisaan data guna penyajian informasi tentang kesejahteraan sosial;
- d. Penganalisaan, pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program;
- e. Menghimpun bahan kebijakan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. Pelaksanaan penghimpunan data dan penyiapan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas;
- g. Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- h. Penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
- i. Pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran;
- j. Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan dinas;
- k. Menyusun kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;
- l. Pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung;
- m. Pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

2.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bertugas :

1. Melakukan perencanaan, anggaran, pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dikaksud dalam ayat (1), Sub bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat dinas, tamu-tamu dinas, dan pelaksanaan kehumasan;
 - c. Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;
 - d. Pelaksanaan penertiban, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya;
 - e. Penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi dinas, dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya;

3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

1. Bertugas;
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan bidang perikanan tangkap.
2. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap berfungsi:
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Teknologi Penangkapan, sarana dan prasarana serta pengendalian sumber daya ikan;
 - b. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - c. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3.1 Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap

1. Bertugas;
Membantu Kepala Bidang perikanan tangkap dalam peningkatan

- pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
2. Dalam menyelenggarakan tugas Seksi sarana dan Prasarana perikanan tangkap berfungsi:
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana, meliputi perencanaan pembangunan perikanan skala kecil;
 - b. Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah kewenangan kabupaten;
 - c. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dan penetapan lokasi pembangunan serta tempat pelelangan ikan kewenangan kabupaten;
 - d. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan 0 s/d 5 GT, pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan;
 - e. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan;
 - f. Dukungan dalam penetapan standarisasi kelayakan kapal penangkapan perikanan dan penggunaan alat tangkap yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

3.2 Kepala Seksi Teknologi, Kenelayan dan Perizinan

1. Bertugas;

Membantu Kepala Bidang Perikanan tangkap dalam pengembangan, peningkatan teknologi dan pengembangan sumberdaya nelayan serta pengelolaan perizinan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas Seksi Teknologi , Kenelayan dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan langkah-langkah pengembangan dan peningkatan teknologi perikanan tangkap;
 - b. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kenelayan menjadi andal;
 - c. Melakukan pengelolaan perizinan bidang perikan tangkap;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan atasan; dan
 - e. Pelaporan hasil tugas kepada Kepala Bidang.

3.3 Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Dan Sumber Daya Ikan,

1. Bertugas;

Menyiapkan membantu Kepala Bidang perikanan tangkap dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan dan sumber daya ikan.

2. Dalam menyelenggarakan tugas Seksi pengelolaan tempat pelelangan ikan dan sumber daya ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan langkah-langkah pengembangan dan peningkatan tempat pelelangan ikan ;
- b. Melakukan peningkatan dan pengelolaan sumber daya ikan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
- d. Pelaporan hasil tugas kepada Kepala Bidang.

4 Kepala Bidang Perikanan Budidaya

1. Bertugas;

Membantu kepala Dinas Perikanan dalam pelaksanaan kebijakan perikanan budidaya, agar dapat berdaya saing dan berdaya guna;

2. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam peningkatan bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan teknis, pembinaan , standarisasi peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya, ketersediaan pakan, peningkatan mutu induk dan bibit unggul, peningkatan usaha budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, perizinan, pengawasan produksi, serta pembinaan hama dan penyakit ikan;
- b. Pelaksanaan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan
- c. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4.1 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya,

1. Bertugas;

Membantu Kepala Bidang perikanan budidaya dalam peningkatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;

2. Dalam menyelenggarakan tugas seksi sarana dan prasarana perikanan

budidaya dalam peningkatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi;

- a. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan normal, standar, prosedur dan kriteria sarana dan prasarana perikanan budidaya ikan (BDI);
- b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- c. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4.2 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan,

1. Bertugas;

Membantu Kepala Bidang perikanan budidaya dalam peningkatan pengembangan teknologi budidaya ikan;

2. Dalam menyelenggarakan tugas seksi pengembangan teknologi budidaya ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang budidaya perikanan;
- b. Melaksanakan kebijakan budidaya perikanan, pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan air tawar, air payau dan air laut, pelaksanaan kebijakan mutu benih ikan, induk dan cara budidaya perikanan, dan pelaksanaan pelayanan usaha;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
- d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4.3 Kepala Seksi Sumberdaya, Perizinan Dan Produksi Budidaya Ikan,

1. Bertugas;

Membantu Kepala Bidang perikanan budidaya dalam peningkatan sumber daya, perizinan dan produk budidaya ikan;

2. Dalam menyelenggarakan tugas seksi sumber daya, perizinan dan produk budidaya ikan dalam peningkatan pengembangan sumber daya, perizinan dan produk budidaya ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan langkah-langkah pengembangan dan peningkatan sumber daya ikan serta produksi budidaya;

- b. Melakukan pengelolaan perizinan bidang perikanan budidaya;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan,

- 1. Bertugas;
Membantu Kepala Dinas Perikanan dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pelaku usaha perikanan agar dapat berdaya saing dan berdaya guna.
- 2. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang pemberdayaan pelaku usaha perikanan dalam peningkatan pengembangan pemberdayaan pelaku usaha perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan persiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan monitoring pelaporan pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha perikanan;
 - b. Melaksanakan sistem pengendalian intern, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - c. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5.1 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana P2HP,

- 1. Bertugas;
Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dalam peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana P2HP.
- 2. Dalam menyelenggarakan tugas seksi sarana dan prasarana P2HP dalam peningkatan pengembangan sarana dan prasarana P2HP menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan normal standar, prosedur dan kriteria;
 - b. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dalam hal sarana dan prasarana P2HP;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

5.2. Kepala Seksi Teknologi Hasil Perikanan

1. Bertugas;

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dalam pengembangan teknologi hasil perikanan;

2. Dalam menyelenggarakan tugas seksi teknologi hasil perikanan dalam peningkatan pengembangan teknologi hasil perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan normal ,standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dalam hal teknologi hasil perikanan;

b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

c. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

5.3. Kepala Seksi Kelembagaan,

1. Bertugas;

Membantu Kepala Bidang pemberdayaan pelaku usaha perikanan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang kelembagaan.

2. Dalam menyelenggarakan tugas seksi kelembagaan dalam peningkatan pengembangan kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program kegiatan bidang kelembagaan penyuluh;

c. Melaksanakan pelaksanaan peningkatan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha melalui [proses pembelajaran (pendidikan dan pelatihan);

d. Melaksanakan pengembangan pemantauan, pemantapan pendidikan dan pelatihan serta akreditasi fungsional penyuluh;

e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan pembudidaya dan nelayan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana serta pembiayaan;

- f. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
- g. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kelembagaan dan penyuluh dan akreditasi fungsional ketenagaan penyuluhan;
- h. Pelaksanaan penilaian kelembagaan penyuluh kelembagaan petani dan ketenagaan penyuluh;
- i. Pelaksanaan analisis kebutuhan tenaga penyuluh dan sistem informasi penyuluh tentang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
- j. Pelaksanaan dan pembinaan penerapan standard an prosedur sistem kerja penyuluhan bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
- k. Pelaksanaan dan pembinaan penerapan penilaian dan penyusunan angka kredit fungsional penyuluh;
- l. Pelaksanaan pembinaan penerapan persyaratan sertifikasi dan akreditasi fungsional penyuluh;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang Perikanan dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagai dimaksud diatas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.1.4 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, serta Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko terdiri dari:

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas Membawahi:

1. Sekretariat, membawahi 2 (dua) bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 - b. Seksi Teknologi, Kenelayan dan Perizinan
 - c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelengan Ikan Sumber Daya Ikan
3. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya ikan
 - c. Seksi Sumber daya, Perizinan dan Produksi Budidaya Ikan
4. Bidang Pemberdayaan pelaku Usaha Perikanan, membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana P2HP
 - b. Seksi Teknologi Hasil Perikanan
 - c. Seksi Kelembagaan
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu,

pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja dalam pencapaian hasil yang diinginkan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

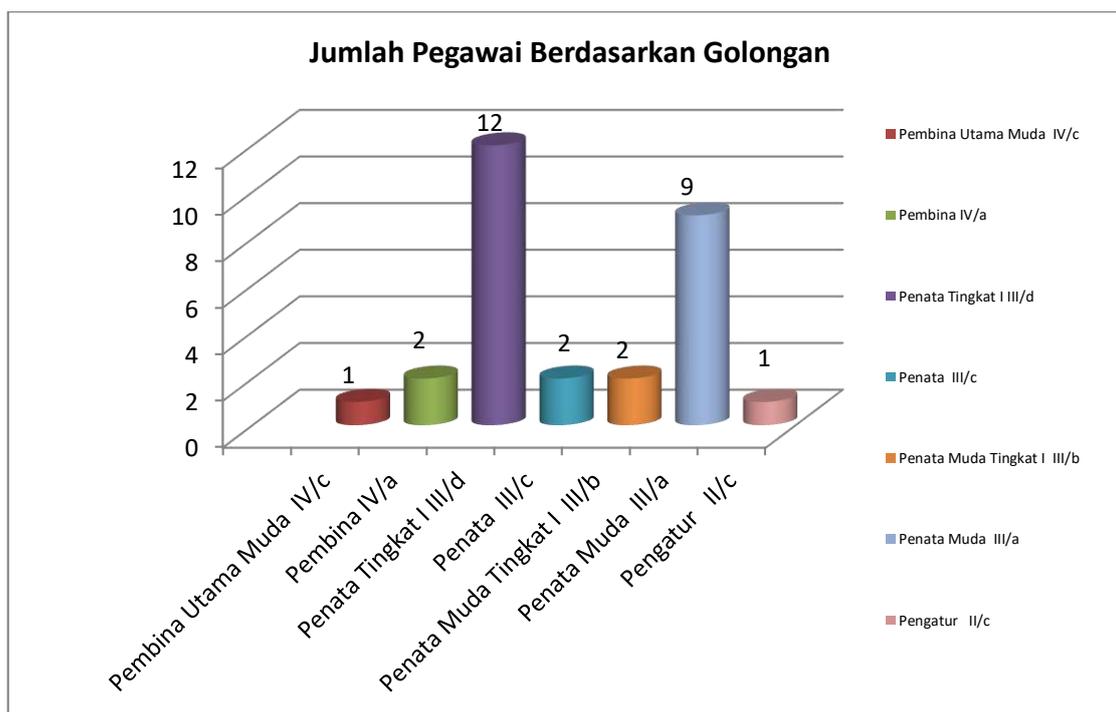
Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kab Mukomuko Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pembina Utama Muda IV/c	1	1	-
2	Pembina IV/a	2	2	-
3	Penata Tingkat I III/d	12	3	9
4	Penata III/c	2	2	
4	Penata Muda Tingkat I III/b	2	1	1
5	Penata Muda III/a	9	6	3
6	Pengatur II/c	1	1	
JUMLAH		29	16	13
	Pegawai Tidak Tetap	34	14	20

Sumber: Dinas Perikanan Tahun 2021

Gambar 2—1



Berdasarkan tabel diatas jumlah keseluruhan Pegawai Dinas Perikanan Mukomuko berjumlah 63 orang. Terdiri dari 29 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 34 orang Non ASN.

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

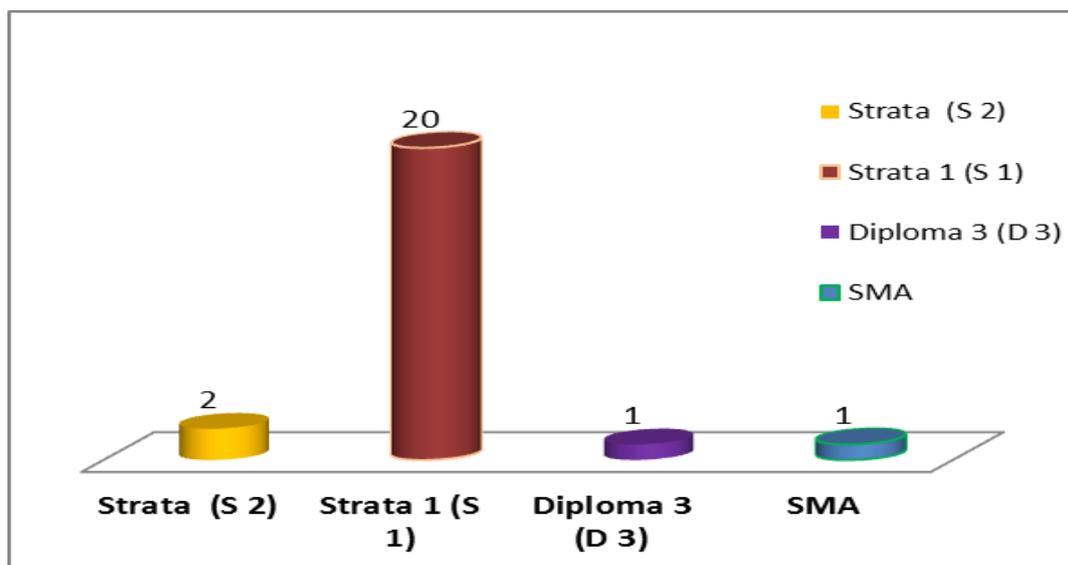
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata (S 2)	3
2	Strata 1 (S 1)	23
3	Diploma 3 (D 3)	1
4	SLTA	2
Jumlah		29

Sumber data: Dinas Perikanan Tahun 2021

Gambar 2-2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dari tabel 2.2 klasifikasi tingkat pendidikan strata (S2) berjumlah 2 orang dengan persentase sebesar 10 persen dari jumlah pegawai. Pada tingkat pendidikan Diploma (Si) berjumlah 20 orang dengan persentase 83 persen, Diploma (3) 1 orang dan SMA 1 orang. Dari tabel diatas yang paling dominan tingkat pendidikan di Dinas Perikanan yaitu strata (S1) dengan jumlah 18 pegawai dengan persentase sebesar 83 persen dari keseluruhan jumlah pegawai.

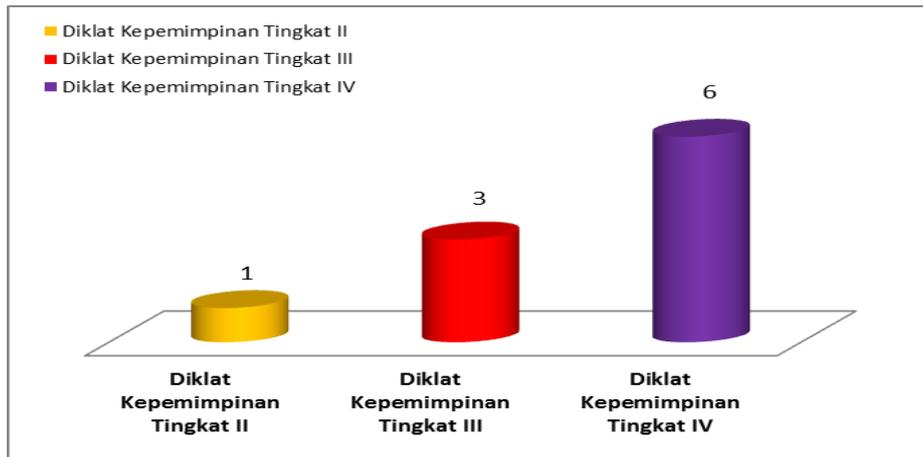
3. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan

Tabel 2.3

No	Latihan Jabatan	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	1
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	4
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	6

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Gambar 2-3
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat



Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Gedung Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko bertempat di jalan Imam Bonjol Komp. Perkantoran Kabupaten Mukomuko. Gedung ini untuk menampung pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko;
2. Masing-masing eselon III telah memiliki kendaraan dinas satu unit Kendaraan roda 4 (empat) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, eselon IV memiliki kendaraan dinas sepeda motor.
3. Setiap bidang telah dibekali perangkat komputer dan laptop, tetapi masih kurang, karena jumlah laptop dan komputer yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah pegawai yang ada.

Selain didukung oleh anggaran dari APBD Kabupaten Mukomuko, Dinas Perikanan berharap mendapat dana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko (2016 - 2020), dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan yang terdapat pada tabel 2.4, dan 2.5.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jangka Waktu Penyediaan Surat Menyurat			1 Tahun	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
2	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat			1520 Lembar	0	321	321	321	321	0	321	321	321	321	0%	100%	100%	100%	100%	
3	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5 Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan			120 Orang	20	20	20	20	20	20	16	16	16	16	100%	80%	80%	80%	80%	
5	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan Kantor			13 Orang	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Jangka waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor			12 bulan	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
7	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor			178 jenis	0	18	40	18	40	0	18	40	18	27	0%	100%	100%	100%	68%	
8	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 bulan	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
9	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			38 jenis	0	2	2	5	9	0	2	2	5	9	0%	100%	100%	100%	100%	
10	Jangka Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor			12 bulan	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
11	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor			22 jenis	0	6	4	6	7	0	6	4	6	7	0%	100%	100%	100%	100%	
12	Jangka Waktu Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor			4 bulan	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
13	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor			139 jenis		23	29	19	10	0	23	29	19	10	0%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	Jangka Waktu Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 bulan	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
15	Jumlah Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6 jenis	0	2	1	1	2	0	2	1	1	2	0%	100%	100%	100%	100%	
16	Jangka Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman			12 Bulan	12	0	0	0	0	12			0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
17	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman			20 jenis	0	8	3	3	3	0	8	3	3	3	0%	100%	100%	100%	100%	
18	Jangka Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi keluar daerah			12 Bulan	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
19	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah			159 kali	0	18	26	54	57		18	26	51	14	0%	100%	100%	94%	25%	
20	Jangka Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi kedalam daerah			12 Bulan	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
21	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi kedalam daerah			1087 kali	0	173	170	242	190	0	173	170	235	155	0%	100%	100%	97%	82%	
22	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Kantor			12 Bulan	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
23	Jumlah Penerima Jasa Kantor			140 orang	0	28	28	31	32	0	28	28	31	32	0%	100%	100%	100%	100%	
24	Jangka Waktu pemeliharaan kendaraan dinas			12 Bulan	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
25	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			102 unit	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0%	100%	100%	100%	100%	
26	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan			11 unit	0	8	0	3	3	0	8	0	3	3	0%	100%	#DIV/0!	100%	100%	
27	Jumlah Peralatan Gedung Kantor			3 Item	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
28	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			12 unit	0		6	2	2	0	0	6	2	2	0%	0%	100%	100%	100%	
29	Jumlah Rehabilitas sedang / berat Kantor			1 unit	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
30	Jumlah Rehabilitas Gedung Kantor			1 Unit	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	
31	Jumlah pengadaan perahu karet dan mesin tempel			2 unit	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
32	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana BBI				0	0	11	11	11	0	0	11	11	6	0%	0%	100%	100%	55%	
33	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor				0	0	0	5	1	0	0	0	4	1	0%	0%	0%	80%	100%	
34	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor				0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0%	0%	0%	100%	0%	
35	Jumlah Pembangunan Gudang Perikanan				0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	
36	Jumlah Pengadaan Aquarium				0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0%	0%	0%	100%	0%	
37	Jumlah Pelaksanaan Pengiriman Siswa Berprestasi Untuk Mengikuti Pendidikan Anak Pelaku Utama Perikanan			1 Kali	1	0	0	0	0	1		0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
38	jumlah siswa taruna dan taruni yang mendapat biaya pendidikan			33 org	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	
39	Jumlah Pengiriman Peserta Mengikuti Kursus-Kursus lainnya			5 org	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	
40	Jumlah Peningkatan Sumberdaya Aparatur			10 org	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	
41	Jumlah masyarakat pesisir yang menerima modal usaha			35 kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
42	Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi pencegahan illegal fishing			5 lokasi	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	100%	100%	100%	0%	0%	
43	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok wanita nelayan			4 kelompok	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0%	0%	100%	100%	0%	
44	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya			28 Kali	28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
45	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan BBI			12 Bulan	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
46	Jangka Waktu Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan UPR			6 Bulan	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
47	Jumlah Penyediaan Pendampingan Program Pengembangan Gerakan Pakan Ikan Mandiri			9 Bulan	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
48	Belanja Induk Ikan BBI Lubuk Pinang			1 Paket	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
49	Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya			16 Jenis	0	0	4	1	6	0	0	4	1	6	0%	0%	100%	100%	100%	
50	Jumlah Optimalisasi BBI Lubuk Pinang dan UPR dan POKDAKAN			2 Unit	0	0	0	2	4	0	0	0	2	0	0%	0%	0%	100%	0%	
51	Jumlah Pelaksanaan Klarifikasi Usulan Masyarakat			60 Kelompok	0	0	20	20	0	0	0	20	20	0	0%	0%	100%	100%	0%	
52	Jumlah pembentukan dan pendampingan Koperasi Kelompok Pembudidaya Ikan			4 Kelompok	0	0	1	10	0	0	0	1	10	0	0%	0%	100%	100%	0%	
53	Jumlah Pengadaan Benih Ikan Lele dan Terpal			4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54	Jumlah Peserta Pelatihan Teknologi Perikanan			10	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0%	0%	0%	100%	0%
55	Jumlah Penyediaan Pakan Ikan			6100 Kg	0	0	0	6100	0	0	0	0	6100	0	0%	0%	0%	100%	0%
56	Jumlah Pembangunan Hatchery BBI Lubuk Pinang			1 Paket	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0%	0%	0%	100%	0%
57	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap Sarana Alat Bantu Tangkap (DAU)			25 unit/ jenis	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
58	1). Pengadaan Jaring 2 Inchi, 2).Pengadaan Jaring 4 Inchi, 3). Pengadaan Jaring 5 Inchi, 4). Pengadaan Jaring Trammel Net, 5). Pengadaan Cool Box 100 Liter, 6). Pengadaan Mesin Tempel 15 PK, 7). Pengadaan Rawai (Mini Long Line)			180 piece, 330 piece, 330 piece, 399 piece, 140 unit, 6 unit, 35 set	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
59	Jumlah Pengadaan Mesin Tempel 15 PK dan 40 PK			2 item	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
60	Jumlah Pengadaan Peralatan Penangkapan Ikan			12 Jenis	0	0	3	4	0	0	0	3	4	0	0%	0%	100%	100%	0%
61	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan) DAK			12 Jenis		3		3	6		3		3	6	0%	100%	0%	100%	100%
62	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Program Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan			6 Bulan	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
63	Jumlah Klasifikasi dan Penomoran Kapal Alat Tangkap			500 Unit	500	0	0	0		500	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
64	Jumlah Pelaksanaan Terbentuk HNSI			1 HNSI	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
65	Jumlah Penomoran Kapal dan Alat Tangkap yang didata Se-Kabupaten Mukomuko			150 unit	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	
66	Jumlah Pendataan Kapal dan Alat Tangkap SeKabupaten Mukomuko			90 Kelompok	0	0	30	0	0	0	0	30	30	0	0%	0%	100%	100%	0%	
67	Jumlah Kelompok Binaan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap			40 kip	1	0	10	10	0	1	0	10	10	0	100%	#DIV/0!	100%	100%	0%	
68	Jumlah bimbingan Teknis Peningkatan SDM Nelayan			42 Kelompok	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	
69	Jumlah Pembangunan Tempat pelelangan Ikan			2 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
70	Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan			2 unit	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	50%	100%	
71	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Asuransi Nelayan			0 kali	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	
72	Tumbuhnya Kesadaran Nelayan tentang Peraturan Pemerintah			100 orang	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	
73	Jumlah Penerbitan BPKP (Bukti Pencatatan kapal Perikanan Tangkap)			200 Unit	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0%	0%	0%	100%	0%	
74	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terkait Program DKP			2 Kali	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
75	Jumlah Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Tahunan			5 Dokumen	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
76	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra, Renja dan renja Perubahan			11 dok	0	3	2	2	2	0	3	2	2	2	0%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
77	Jumlah Dokumen Profil Dinas			2 Dokumen	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
78	Jumlah Dokumen laporan Kinerja dan perjanjian Kinerja			3 Dokumen	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	
79	Jumlah Dokumen laporan Kinerja dan perjanjian Kinerja Tepat Waktu			12 Dokumen	0	0	3	3	2	0	0	3	3	2	0%	0%	100%	100%	100%	
80	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	
81	Jumlah Kelompok yang mendapat Penguatan dan Pembinaan Kelembangan UPI (Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan)			10 Kelompok	10	1	0	0	0	10	1	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%	
82	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan pengolahan Hasil produksi Perikanan			3 jenis	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0%	0%	100%	0%	0%	
83	1). Jumlah Pelaksanaan Lomba Diversifikasi Produk Olahan Ikan Tingkat Kabuapten, 2). Jumlah Keikutsertaan dalam Lomba diversifikasi Produk Olahan Ikan Tingkat Provinsi, 3). Jumlah Pelaksanaan Kampanye Peningkatan Konsumsi Ikan			1 Kali 1 Kali 1 Kali	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
84	Jumlah Pelaksanaan Kampanye dan Promosi Hasil Perikanan			12 Kali	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0%	0%	100%	100%	0%	
85	Jumlah Pelaksanaan Kampanye dan Promosi Hasil Perikanan			2 Kali	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%	
86	1). Pembangunan Pasar Ikan Tradisional, 2).Pembangunan Sarana Air Bersih Pasar Ikan Tradisional, 3). Pengadaan Cool Box 200 Liter, 4). Pengadaan Cool Box 100 liter			2 Unit, 2 Unit, 48 Unit, 100 Unit	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
87	Jumlah Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DAK)			14 jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
88	Jumlah Pengendalian Mutu dan Higienis Ikan			24 lokasi	0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	0%	0%	100%	100%	0%	
89	jumlah yang mengikuti Sosialisasi Cara pengolahan Ikan CPIB			60 klp	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
90	Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Pabrik Es			2 unit	0	0			0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
91	Jumlah Promosi Produk-Produk Perikanan			3 Kali	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0%	0%	0%	100%	100%	
92	Jumlah Pembangunan Kolam Ikan			25 Lokasi	0	5	10	0	0	0	5	10	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	
93	Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana kawasan Penangkar penyus			6 Item	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0%	0%	100%	100%	0%	
94	Jumlah Pelaksanaan Pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan			1 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
95	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penangkar Penyus			5 org	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
96	Jangka Waktu Penyediaan Operasional Pencegahan Ilegal Fishing			9 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
97	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Ilegal Fishing dalam mempertahankan Pendapatan Masyarakat Pesisir			12 kali	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0%	0%	100%	100%	0%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
98	1). Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2). Jumlah Pelaksanaan Study Banding POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 3).Jumlah Tukik yang dilestarikan			2, 1, 10,000 Kelompok Kali ekor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
99	Jumlah Pembinaan Kelembagaan POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			10 klp	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
100	Jumlah Peningkatan Kapasitas Penangkar Penyuluhan dan Konservasi Ikan Mikih			2 Kali	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0%	0%	0%	100%	0%	
101	Jumlah pelaksanaan penanaman mangrove			2000 Batang	1	0	0	2000	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
102	Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan			8 jenis	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0%	0%	100%	100%	0%	
103	Jumlah Pembina dan Validasi Data POKLAHSAR,POKDAKAN, KUB			60 klp	0	0	15	20	0	0	0	15	20	20	0%	0%	100%	100%	0%	
104	Jumlah peningkatan Kapasitas Penyuluhan Perikanan dan Kelembagaan Kelompok			5 org	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
105	Jumlah Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAU)			300 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
106	Jumlah Pengadaan Alat Penanganan Ikan di atas Kapal (DAU)			20 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	
107	Jumlah Siswa Taruna dan Taruni yang Mendapat Biaya Pendidikan			45 orang	0	0	20	12	5	0	0	20	12	5	0%	0%	100%	100%	100%	
108	Jumlah Calon Penerima asuransi Nelayan			2000 org	0	0	500	0	500	0	0	500	0	500	0%	0%	0%	0%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)					
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
109	Jumlah Pengiriman Pelatihan Sistem Informasi Mitigasi Bencana (SIMAIL) Operator dan Sosialisasi KTNA Nelayan			2 Kali	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
110	Jumlah Pengiriman Pelatihan GIS (Geografis Informasi Satelit)			1 Kali	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Pagu Anggaran pada Tahun					Realisasi Capaian Anggaran Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun					Rata-rata pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jangka Waktu Penyediaan Surat Menyurat	1,320,000	-	-	-	-	1,320,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	1,320,000	1,320,000
2	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	0	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	0	1,386,000	1,386,000	1,386,000	1,386,000	-	100%	100%	100%	100%	5,544,000	5,544,000
3	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,773,610	42,556,750	49,674,478	58,500,000	90,000,000	26,773,610	33,130,729	49,674,478	52,133,541	73,107,284	100%	78%	100%	89%	81%	234,819,642	234,819,642
4	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan	120,800,000	133,318,500	94,800,000	135,270,000	132,200,000	120,800,000	88,218,500	94,800,000	135,270,000	78,750,000	100%	66%	100%	100%	60%	517,838,500	517,838,500
5	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan Kantor	5,400,000	24,000,000	18,000,000	36,000,000	36,000,000	5,400,000	24,000,000	18,000,000	36,000,000	36,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	119,400,000	119,400,000
6	Jangka waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	18,476,000	-	-	-	-	18,476,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	18,476,000	18,476,000
7	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	19,399,800	20,518,300	20,518,300	17,000,000	-	14,044,500	17,759,000	52,114,500	12,790,000	#DIV/0!	72%	87%	254%	75%	96,708,000	96,708,000
8	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,161,500	-	-	-	-	20,161,500	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	20,161,500	20,161,500
9	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	21,187,845	21,187,845	21,727,000	20,000,000	-	17,121,100	19,667,750	58,395,850	18,260,000	0%	81%	93%	269%	91%	113,444,700	113,444,700
10	Jangka Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	1,485,000	-	-	-	-	1,485,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	1,485,000	1,485,000
11	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	-	1,575,000	1,575,000	31,575,000	1,500,000	-	1,548,000	1,575,000	34,016,872	1,155,000	0%	98%	100%	108%	77%	38,294,872	38,294,872
12	Jangka Waktu Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,595,000	-	-	-	-	3,595,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	3,595,000	3,595,000
13	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	36,150,000	2,675,000	8,222,000	8,000,000	-	7,811,500	2,168,000	16,798,500	7,096,000	0%	22%	81%	204%	89%	33,874,000	33,874,000
14	Jangka Waktu Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,805,000	-	-	-	-	10,805,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	10,805,000	10,805,000
15	Jumlah Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	11,676,000	14,551,200	18,435,000	20,000,000	-	10,740,000	14,551,200	40,216,200	17,730,000	0%	92%	100%	218%	89%	83,237,400	83,237,400
16	Jangka Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	28,260,000	-	-	-	-	28,260,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	28,260,000	28,260,000
17	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	-	40,267,500	35,536,000	35,536,000	23,000,000	-	30,135,000	33,693,500	99,364,500	22,013,000	75%	95%	280%	96%	185,206,000	185,206,000	

No	Uraian	Pagu Anggaran pada Tahun					Realisasi Capaian Anggaran Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun					Rata-rata pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Jangka Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi keluar daerah	222,835,385	-	-	-	-	222,835,385	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	222,835,385	222,835,385
19	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi keluar daerah	-	87,534,600	133,970,000	191,295,000	35,000,000	-	179,558,061	173,098,381	525,704,345	32,679,000	0%	205%	129%	275%	93%	911,039,787	911,039,787
20	Jangka Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi kedalam daerah	47,935,000	-	-	-	-	47,935,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	47,935,000	47,935,000
21	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi kedalam daerah	-	73,683,750	68,825,000	59,561,000	40,000,000	-	70,520,000	68,717,238	197,467,238	35,280,000	0%	96%	100%	332%	88%	371,984,476	371,984,476
22	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Kantor	66,150,000	-	-	-	-	66,150,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	66,150,000	66,150,000
23	Jumlah Penerima Jasa Kantor	-	196,950,000	196,950,000	345,000,000	390,000,000	-	193,350,000	204,145,000	742,495,000	285,000,000	0%	98%	104%	215%	73%	1,424,990,000	1,424,990,000
24	Jangka Waktu pemeliharaan kendaraan dinas	63,418,500	-	-	-	-	63,418,500	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	63,418,500	63,418,500
25	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	-	75,000,000	40,000,000	62,300,000	38,000,000	-	39,721,500	35,802,500	124,478,475	33,842,303	0%	53%	90%	200%	89%	233,844,778	233,844,778
26	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan	-	15,175,000	-	9,225,000	5,940,000	-	5,500,000	-	9,225,000	4,814,000	0%	36%	-	100%	81%	19,539,000	19,539,000
27	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	29,946,000	-	-	-	-	29,946,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	29,946,000	29,946,000
28	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	52,943,725	61,337,475	20,400,000	-	-	52,943,725	61,337,475	20,400,000	0%	0%	100%	100%	100%	134,681,200	134,681,200
29	Jumlah Rehabilitas sedang / berat Kantor	125,000,000	-	-	-	-	125,000,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	125,000,000	125,000,000
30	Jumlah Rehabilitas Gedung Kantor	-	100,000,000	-	22,700,000	-	-	99,173,000	-	99,173,000	-	0%	99%	0%	437%	-	198,346,000	198,346,000
31	Jumlah pengadaan perahu karet dan mesin tempel	111,130,000	-	-	-	-	111,130,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	111,130,000	111,130,000
32	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana BBI	-	-	33,475,000	33,475,000	36,000,000	-	-	29,595,000	55,725,000	25,750,000	#REF!	#REF!	88%	166%	72%	111,070,000	111,070,000
33	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	-	-	-	35,000,000	5,000,000	-	-	-	29,900,000	5,000,000	0%	0%	0%	85%	100%	34,900,000	34,900,000
34	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	-	-	-	29,500,000	-	-	-	-	28,900,000	-	0%	0%	0%	98%	0%	28,900,000	28,900,000
35	Jumlah Pembangunan Gudang Perikanan	-	-	-	198,800,000	128,680,000	-	-	-	67,561,000	128,680,000	0%	90%	0%	34%	100%	196,241,000	196,241,000
36	Jumlah Pengadaan Aquarium	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	24,999,000	-	0%	97%	0%	100%	0%	24,999,000	24,999,000

No	Uraian	Pagu Anggaran pada Tahun					Realisasi Capaian Anggaran Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun					Rata-rata pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	Jumlah Pelaksanaan Pengiriman Siswa Berprestasi Untuk Mengikuti Pendidikan Anak Pelaku Utama Perikanan	307,000,000	-	-	-	-	307,000,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	307,000,000	307,000,000
38	Jumlah siswa taruna dan taruni yang mendapat biaya pendidikan	-	200,000,000	-	-	-	-	180,215,400	-	180,215,400	-	0%	90%	0%	0%	0%	360,430,800	360,430,800
39	Jumlah Pengiriman Peserta Mengikuti Kursus-Kursus lainnya	-	50,000,000	-	-	-	-	48,455,000	-	48,455,000	-	0%	97%	0%	0%	0%	96,910,000	96,910,000
40	Jumlah Peningkatan Sumberdaya Aparatur	-	-	20,000,000	-	-	-	-	19,954,000	19,954,000	-	0%	0%	100%	0%	0%	39,908,000	39,908,000
41	Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi pencegahan illegal fishing	11,794,000	50,000,000	-	-	-	11,794,000	32,276,300	-	32,276,300	-	100%	65%	0%	0%	0%	76,346,600	76,346,600
42	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok wanita nelayan	-	-	39,700,000	44,874,400	-	-	-	22,689,500	44,874,400	-	0%	0%	57%	100%	0%	67,563,900	67,563,900
43	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
44	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	38,875,000	-	-	-	-	38,875,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	38,875,000	38,875,000
45	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan BBI	111,807,692	-	-	-	-	111,807,692	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	111,807,692	111,807,692
46	Jangka Waktu Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan UPR	16,600,000	-	-	-	-	16,600,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	16,600,000	16,600,000
47	Jumlah Penyediaan Pendampingan Program Pengembangan Gerakan Pakan Ikan Mandiri	30,350,000	-	-	-	-	30,350,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	30,350,000	30,350,000
48	Belanja Induk Ikan BBI Lubuk Pinang	474,028,000	-	-	-	-	474,028,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	474,028,000	474,028,000
49	Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	-	-	741,000,000	55,299,200	276,359,000	-	-	675,023,000	729,862,200	252,218,000	0%	0%	91%	1320%	91%	1,657,103,200	1,657,103,200
50	Jumlah Optimalisasi BBI Lubuk Pinang dan UPR dan POKDAKAN	-	-	-	145,400,000	77,100,000	-	-	-	135,330,000	-	0%	0%	0%	93%	0%	135,330,000	135,330,000
51	Jumlah Pelaksanaan Klarifikasi Usulan Masyarakat	-	-	25,000,000	20,000,000	-	-	-	23,900,000	43,700,000	-	0%	0%	96%	219%	0%	67,600,000	67,600,000
52	Jumlah pembentukan dan pendampingan Koperasi Kelompok Pembudidaya Ikan	-	-	18,500,000	30,000,000	-	-	-	16,400,000	46,120,000	-	0%	0%	89%	154%	0%	62,520,000	62,520,000
53	Jumlah Pengadaan Benih Ikan Lele dan Terpal	-	100,000,000	-	-	-	-	82,112,180	-	82,112,180	-	0%	82%	0%	0%	0%	164,224,360	164,224,360
54	Jumlah Peserta Pelatihan Teknologi Perikanan	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	0%	0%	0%	100%	0%	50,000,000	50,000,000
55	Jumlah Penyediaan Pakan Ikan	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	87,630,000	-	0%	0%	0%	88%	0%	87,630,000	87,630,000

No	Uraian	Pagu Anggaran pada Tahun					Realisasi Capaian Anggaran Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun					Rata-rata pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56	Jumlah Pembangunan Hatchery BBI Lubuk Pinang	-	-	-	229,100,000	15,667,200	-	-	-	208,648,800	15,667,200	0%	0%	0%	91%	100%	224,316,000	224,316,000
57	Waktu Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap Sarana Alat Bantu Tangkap (DAU)	-	905,822,000	-	-	-	-	873,641,000	-	873,641,000	-	0%	96%	0%	0%	0%	1,747,282,000	1,747,282,000
58	1). Pengadaan Jaring 2 Inchi, 2).Pengadaan Jaring 4 Inchi, 3). Pengadaan Jaring 5 Inchi, 4). Pengadaan Jaring Trammel Net, 5). Pengadaan Cool Box 100 Liter, 6). Pengadaan Mesin Tempel 15 PK, 7). Pengadaan Rawai (Mini Long Line)	1,405,497,800	-	-	-	-	1,405,497,800	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	1,405,497,800	1,405,497,800
59	Jumlah Pengadaan Mesin Tempel 15 PK dan 40 PK	1,405,497,800	-	-	-	-	1,405,497,800	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	1,405,497,800	1,405,497,800
60	Jumlah Pengadaan Peralatan Penangkapan Ikan	-	-	890,600,000	239,000,000	-	-	-	2,050,776,325	2,279,956,025	-	0%	0%	230%	954%	0%	4,330,732,350	4,330,732,350
61	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan) DAK	-	1,961,468,000	-	675,675,000	748,100,000	-	1,825,168,000	-	2,343,942,000	582,413,280	0%	93%	0%	347%	78%	4,751,523,280	4,751,523,280
62	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Program Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan	26,237,801	-	-	-	-	26,237,801	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	26,237,801	26,237,801
63	Jumlah Pembinaan Mina Pedesaan Tangkap yang dapat bantuan	-	40,000,000	-	-	-	-	30,201,626	-	30,201,626	-	0%	76%	0%	0%	0%	60,403,252	60,403,252
64	Jumlah Klasifikasi dan Penomoran Kapal Alat Tangkap	42,160,000	-	-	-	-	42,160,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	42,160,000	42,160,000
65	Jumlah Pelaksanaan Terbetuk HNSI	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	6,000,000	6,000,000
66	Jumlah Penomoran Kapal dan Alat Tangkap yang didata Se-Kabupaten Mukomuko	42,160,000	52,500,000	-	-	-	42,160,000	52,500,000	-	52,500,000	-	100%	100%	0%	0%	0%	147,160,000	147,160,000
67	Jumlah Pendataan Kapal dan Alat Tangkap SeKabupaten Mukomuko	-	-	30,000,000	-	-	-	-	29,590,000	29,590,000	-	0%	0%	99%	#DIV/0!	0%	59,180,000	59,180,000
68	Jumlah Kelompok Binaan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	6,000,000	-	25,311,000	30,000,000	-	6,000,000	-	23,181,000	53,181,000	-	100%	0%	92%	177%	0%	82,362,000	82,362,000
69	Jumlah bimbingan Teknis Peningkatan SDM Nelayan	-	40,000,000	-	-	-	-	39,680,000	-	39,680,000	-	0%	99%	0%	0%	0%	79,360,000	79,360,000

No	Uraian	Pagu Anggaran pada Tahun					Realisasi Capaian Anggaran Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun					Rata-rata pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70	Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan	-	-	-	148,200,000	56,550,000	-	-	-	31,052,000	56,550,000	0%	0%	0%	21%	100%	87,602,000	87,602,000
71	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Asuransi Nelayan	-	72,124,000	-	-	-	-	61,079,000	-	61,079,000	-	0%	85%	0%	0%	0%	122,158,000	122,158,000
72	Tumbuhnya Kesadaran Nelayan tentang Peraturan Pemerintah	-	72,124,000	-	-	-	-	44,441,000	-	44,441,000	-	0%	62%	0%	0%	0%	88,882,000	88,882,000
73	Jumlah Penerbitan BPKP (Bukti Pencalatan kapal Perikanan Tangkap)	-	-	-	35,800,000	-	-	-	-	30,728,000	-	0%	0%	0%	86%	0%	30,728,000	30,728,000
74	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terkait Program DKP	42,221,000	-	-	-	-	42,221,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	42,221,000	42,221,000
75	Jumlah Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Tahunan	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	35,000,000	35,000,000
76	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra, Renja dan renja Perubahan	-	20,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	18,015,000	14,915,000	46,960,000	11,700,000	0%	90%	99%	313%	78%	91,590,000	91,590,000
77	Jumlah Dokumen Profil Dinas	24,999,800	-	-	-	-	24,999,800	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	24,999,800	24,999,800
78	Jumlah Dokumen laporan Kinerja dan perjanjian Kinerja	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	0%	100%	0%	0%	0%	40,000,000	40,000,000
79	Jumlah Dokumen laporan Kinerja dan perjanjian Kinerja Tepat Waktu	-	-	7,499,000	7,500,000	7,500,000	-	-	7,499,000	14,999,000	2,025,000	0%	0%	100%	200%	27%	24,523,000	24,523,000
80	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	5,000,000	6,000,000	-	-	-	5,000,000	3,015,000	0%	0%	0%	100%	50%	8,015,000	8,015,000
81	Jumlah Kelompok yang mendapat Penguatan dan Pembinaan Kelembangan UPI (Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan)	20,577,500	35,000,000	-	-	-	20,577,500	31,065,000	-	31,065,000	-	100%	89%	0%	0%	0%	82,707,500	82,707,500
82	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan pengolahan Hasil produksi Perikanan	-	-	60,000,000	-	-	-	-	40,378,000	40,378,000	-	0%	0%	67%	0%	0%	80,756,000	80,756,000
83	1). Jumlah Pelaksanaan Lomba Diversifikasi Produk Olahan Ikan Tingkat Kabuapten, 2). Jumlah Keikutsertaan dalam Lomba diversifikasi Produk Olahan Ikan Tingkat Provinsi, 3). Jumlah Pelaksanaan Kompanye Peningkatan Konsumsi Ikan	54,920,000	-	-	-	-	54,920,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	54,920,000	54,920,000

No	Uraian	Pagu Anggaran pada Tahun					Realisasi Capaian Anggaran Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun					Rata-rata pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
84	Jumlah Pelaksanaan Kampanye dan Promosi Hasil Perikanan			70,000,000	250,000,000	-		-	68,120,000	306,231,896	-	0%	0%	97%	122%	0%	374,351,896	374,351,896
85	Jumlah Pelaksanaan Kampanye dan Promosi Hasil Perikanan	54,920,000	78,750,000			-	54,920,000	69,189,520	-	69,189,520	-	100%	88%	0%	0%	0%	193,299,040	193,299,040
86	1). Pembangunan Pasar Ikan Tradisional, 2).Pembangunan Sarana Air Bersih Pasar Ikan Tradisional, 3). Pengadaan Cool Box 200 Liter, 4). Pengadaan Cool Box 100 liter	590,309,200	-	-	-	-	590,309,200	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	590,309,200	590,309,200
87	Jumlah Pengendalian Mutu dan Higienis Ikan	-	-	50,000,000	40,000,000	-		-	48,371,000	85,516,000	-	0%	0%	97%	214%	0%	133,887,000	133,887,000
88	Jumlah yang mengikuti Sosialisasi Cara pengolahan Ikan CPIB	-	-	-	50,000,000	-		-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
89	Jumlah Promosi Produk-Produk Perikanan	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	29,920,000	28,179,000	0%	0%	0%	100%	94%	58,099,000	58,099,000
90	Jumlah Pembangunan Kolam Ikan	-	150,000,000	231,100,000	-	-	-	135,659,000	230,034,000	365,693,000	-	0%	90%	100%	0%	0%	731,386,000	731,386,000
91	Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana kawasan Penangkar penyu	-	-	47,812,000	220,000,000	-	-	-	45,739,000	256,439,600	-	0%	#DIV/0!	96%	117%	0%	302,178,600	302,178,600
92	Jumlah Pelaksanaan Pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan	82,000,000	-	-	-	-	82,000,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	82,000,000	82,000,000
93	Jangka Waktu Penyediaan Operasional Pencegahan Illegal Fishing	17,794,000	-	-	-	-	17,794,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	17,794,000	17,794,000
94	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Illegal Fishing dalam mempertahankan Pendapatan Masyarakat Pesisir	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	36,051,500	85,871,500	-	0%	0%	72%	172%	0%	121,923,000	121,923,000
95	1). Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2). Jumlah Pelaksanaan Study Banding POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 3).Jumlah Tukik yang dilestarikan	12,650,000	-	-	-	-	12,650,000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	12,650,000	12,650,000
96	Jumlah Peningkatan Kapasitas Penangkar Penyu dan Konservasi Ikan Milih	-	-	-	70,000,000	-	-	-	-	57,253,500	-	0%	0%	0%	82%	0%	57,253,500	57,253,500
97	Jumlah pelaksanaan penanaman mangrove	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-

No	Uraian	Pagu Anggaran pada Tahun					Realisasi Capaian Anggaran Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun					Rata-rata pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
98	Jumlah Kelompok Konservasi Penyu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
99	Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan	-	-	20,000,000	40,000,000	-	-	-	17,960,000	52,225,500	-	0%	0%	0%	131%	0%	70,185,500	70,185,500
100	Jumlah Pembina dan Validasi Data POKLAHSAR,POKDAKAN, KUB	-	-	35,520,000	40,000,000	-	-	-	35,520,000	67,004,000	-	0%	0%	0%	168%	0%	102,524,000	102,524,000
101	Jumlah SDM Yang Mengikuti Orientasi Penyuluh Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	0%	0%	0%	0%	0%	30,000,000	30,000,000
102	Jumlah Pelaksanaan Klarifikasi Usulan Masyarakat	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
103	Jumlah Siswa Taruna dan Taruni yang Mendapat Biaya Pendidikan	307,000,000	-	67,000,000	50,000,000	22,550,000	307,000,000	-	67,000,000	114,080,000	22,550,000	100%	0%	100%	228%	100%	510,630,000	510,630,000
104	Jumlah Calon Penerima asuransi Nelayan	-	-	22,000,000	-	13,600,000	-	-	21,760,000	21,760,000	13,600,000	0%	0%	99%	0%	100%	57,120,000	57,120,000
105	Jumlah Pengiriman Pelatihan Sistem Informasi Mitigasi Bencana (SIMAIL) Operator dan Sosialisasi KTNA Nelayan	39,967,300	-	-	-	-	39,967,300	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	39,967,300	39,967,300
106	Jumlah Pengiriman Pelatihan GIS (Geografis Informasi Satelit)	41,572,500	-	-	-	-	41,572,500	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	41,572,500	41,572,500

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko harus menganalisa empat faktor yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi melalui sektor kelautan dan perikanan.

Analisa empat faktor tersebut dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Mukomuko sendiri.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, terdapat pada upaya peningkatan :

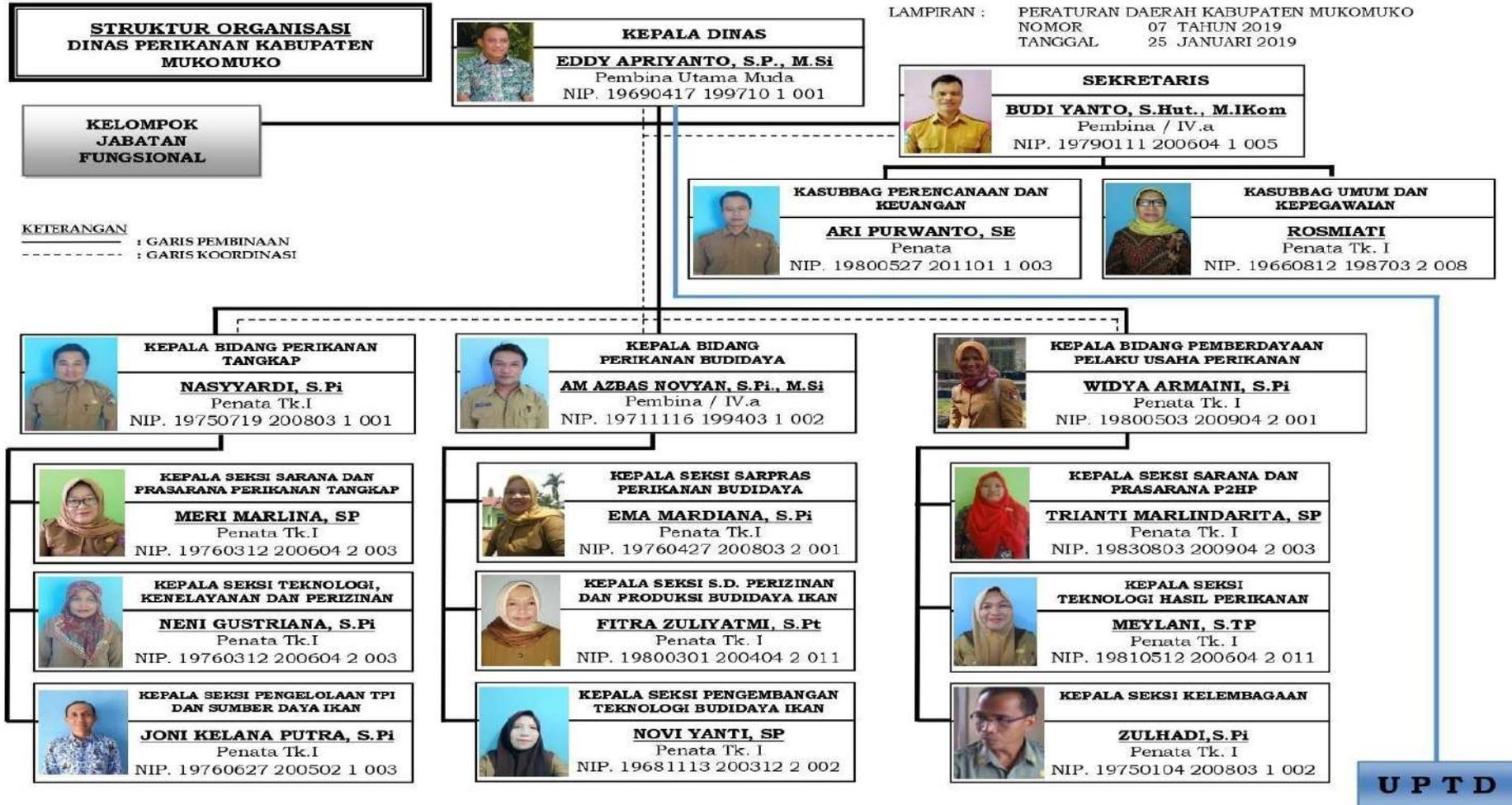
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produk hasil olahan perikanan;
2. Meningkatkan kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap; perikanan budidaya dan pengolahan produk perikanan;
4. Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan melalui peningkatan produksi perikanan dan olahan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan organisasi Dinas Perikanan.

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi Bengkulu dan Nasional;
2. Meningkatnya permintaan pasar;

3. Berkembangnya industri pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
4. Masuk dan berkembangnya IPTEK kelautan dan perikanan;
5. Potensi produksi perikanan yang besar;
6. Adanya jalinan kerjasama nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dalam kelompok maupun antar kelompok, petugas dan stake holder dinas kelautan dan perikanan;
7. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan peran sektor perikanan dalam pembangunan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten”.

Peningkatan kualitas Dinas Perikanan harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi. Permasalahan-permasalahan bidang perikanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko antara lain:

3.1.1 Permasalahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan yang ada antara lain tidak tersedianya gudang penyimpanan arsip/dokumen, hal ini sangat diharapkan adanya pembangunan gedung penyimpanan arsip/dokumen 1 unit. Gambaran kondisi peralatan Dinas Perikanan mengalami rusak berat dan tidak layak pakai, untuk itu diharapkan agar peralatan yang tidak layak pakai tersebut dapat dihapus dari daftar aset dan diganti dengan peralatan baru.

Tabel. 3.1
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi (B, KB, RB)
1	2	3	4
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	B
2.	Toyota Pick UP Double Cabin (Tayota/ Hilux)	1	B
3.	Mitsubishi Strada	1	B
4.	Toyota Avanza 1,3 G M/T	1	B

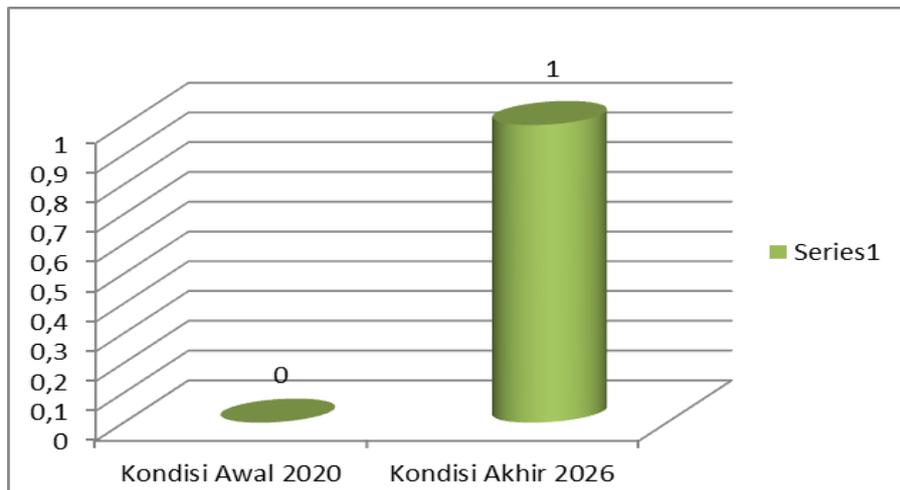
No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi (B, KB, RB)
1	2	3	4
5.	Carry Pic Up	1	KB
6.	Sepeda Motor	14	B
7.	Suver Boat	1	B
8.	Kapal patroli	1	B
9.	Filling Besi	7	B
10.	Lemari Kayu	5	B
11.	Meja Kayu	20	B
12.	Kursi tamu	2	1 RB.1 B
13.	Kursi Lipat	75	B
14.	Kursi putar	6	B
15.	Meja kompter	1	RB
16.	Meja Biro	2	B
17.	Kursi Plastik	56	RB
18.	Mesin Potong	1	B
19.	Kompor gas	1	B
20.	Alat dapur lainnya	3	RB
21.	Tabung Gas	1	B
22.	PC Unit	13	B
23.	Lap Top	14	2 RB 12 B
24.	Personal Komputer	1	B
25.	CPU	2	B
26.	Printer	6	5B, 1 RB
27.	faximil	1	B
28.	Compas	5	B
29.	proyektor	1	B
30.	Werreles Amplifier	1	B
31.	satelit	1	RB
32.	Camera FLM	1	RB

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi (B, KB, RB)
1	2	3	4
33.	Camera attacmen	10	B
34.	Camera Attakmen sony	1	B
35.	Kursi rapat Pejabat besi+busa	12	B
36.	Mesin tik manual portable	1	RB
37.	Bangunan Gedung kantor Permanen	1	B

Sumber data : Dinas Perikanan Tahun 2020

Gambar 3.1

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip/Dokumen



Sumber data DKP 2020

Kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perikanan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

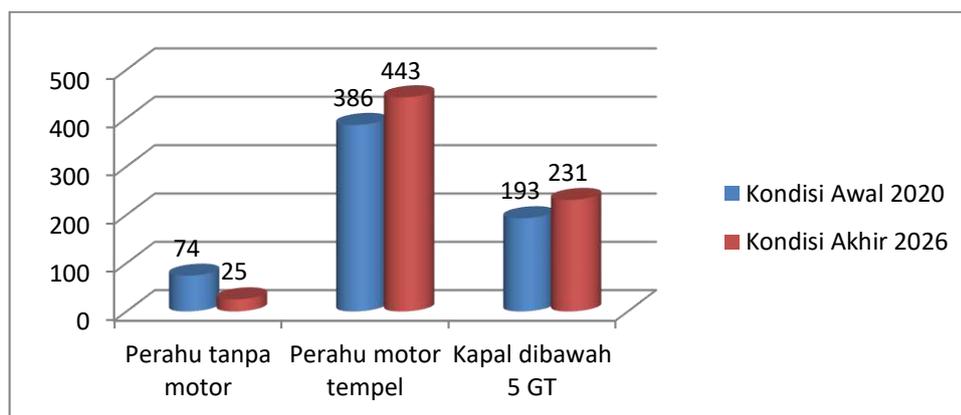
Tabel 3.2
Jumlah Aparatur Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	cukup
2	Sekretaris	1	cukup

3	Kepala Bidang	3	cukup
4	Kepala Sub bagian	2	cukup
5	Kepala Seksi	8	Masih Kurang
6	Staf Dinas	14	Masih Kurang
7	Staf BBI Lubuk Pinang	0	Masih Kurang
8	Penyuluh Perikanan	2	Masih Kurang
Total		32	

Sumber data Dinas Perikanan 2020

Gambar 3.2
Kebutuhan Penambahan ASN



Sumber data Dinas Perikanan 2020

3.1.2 Permasalahan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

a. Pemanfaatan Potensi Lahan belum Optimal

Potensi perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Mukomuko saat ini didominasi oleh budidaya air tawar, air laut dan air payau, potensi budidaya air tawar belum termanfaatkan secara optimal. Jumlah potensi areal budidaya air tawar, air laut maupun air payau 17,873 Ha, yang dimanfaatkan untuk pembuatan kolam 394,56 Ha. Ini menggambarkan areal yang baru termanfaatkan untuk budidaya air tawar sebesar 0,02 %

dari potensi yang tersedia. Untuk kedepannya diharapkan untuk pengembangan potensi kolam menyeluruh di wilayah Kabupaten Mukomuko. *Target sampai tahun 2026 potensi lahan budidaya ikan bisa termanfaatkan seluas 438,56 Ha.*

Tabel 3.3
Luas Potensi Perikanan Budidaya Tahun 2020

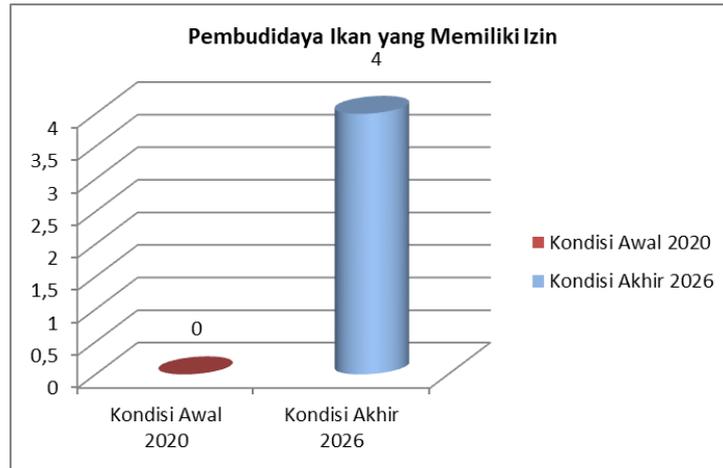
No	Kecamatan	Luas areal Budidaya	
		Potensi (Ha)	Fungsional (Ha)
1	Kota Mukomuko	1700	3,3
2	Air Manjuntjo	5500	100,4
3	V Koto	300	1,06
4	Penarik	3000	50,06
5	Pondok suguh	1000	1,2
6	Lubuk Pinang	1600	50,3
7	Selagan raya	1300	20,8
8	XIV Koto	1020	21,8
9	Teras Terunjam	50	11,7
10	Ipuh	1700	14,2
11	Air rami	240	91,2
12	Teramang Jaya	277	12,3
13	Sungai Rumbai	25	12,3
14	Malin Deman	63	1,2
15	Air Dikit	98	1,5
		17.873	394,56

Sumber data perikanan budidaya 2020 (data di olah)

b. Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin

Saat ini di Kabupaten Mukomuko belum ada Pembudidaya ikan yang mempunyai izin. Hal ini disebabkan pembudidaya ikan di Kabupaten Mukomuko masih berskala kecil sehingga belum diwajibkan mempunyai izin usaha. Akan tetapi pada akhir tahun 2026 ditargetkan ada 4 pembudidaya ikan yang berskala besar di Kabupaten Mukomuko.

Gambar 3.3

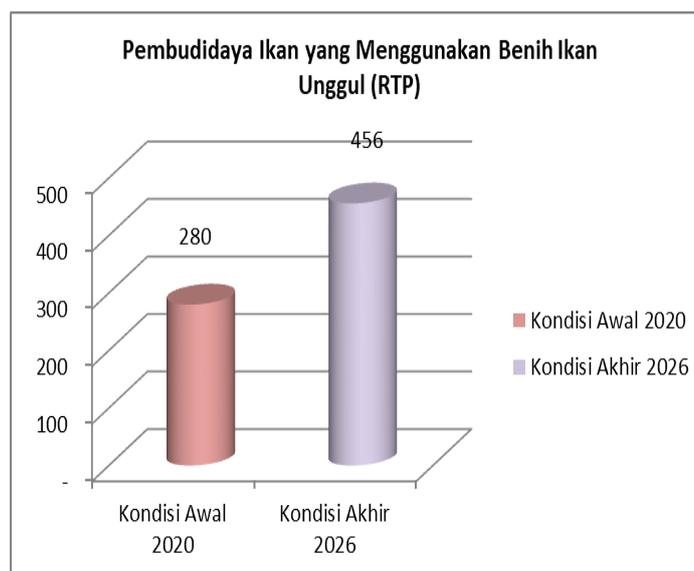


Data Dinas Perikanan Tahun 2020

c. Persentase Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Benih Ikan Unggul

Kondisi saat ini belum sepenuhnya pembudidaya ikan di Kabupaten Mukomuko menggunakan benih ikan unggul. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya (RTP) yang menggunakan benih ikan unggul lebih kurang 280 RTP. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan benih ikan unggul yang belum mencukupi. Pada akhir tahun 2026 ditargetkan sudah ada 456 RTP yang menggunakan benih ikan unggul untuk menunjang pencapaian target produksi perikanan budidaya.

Gambar 3.4

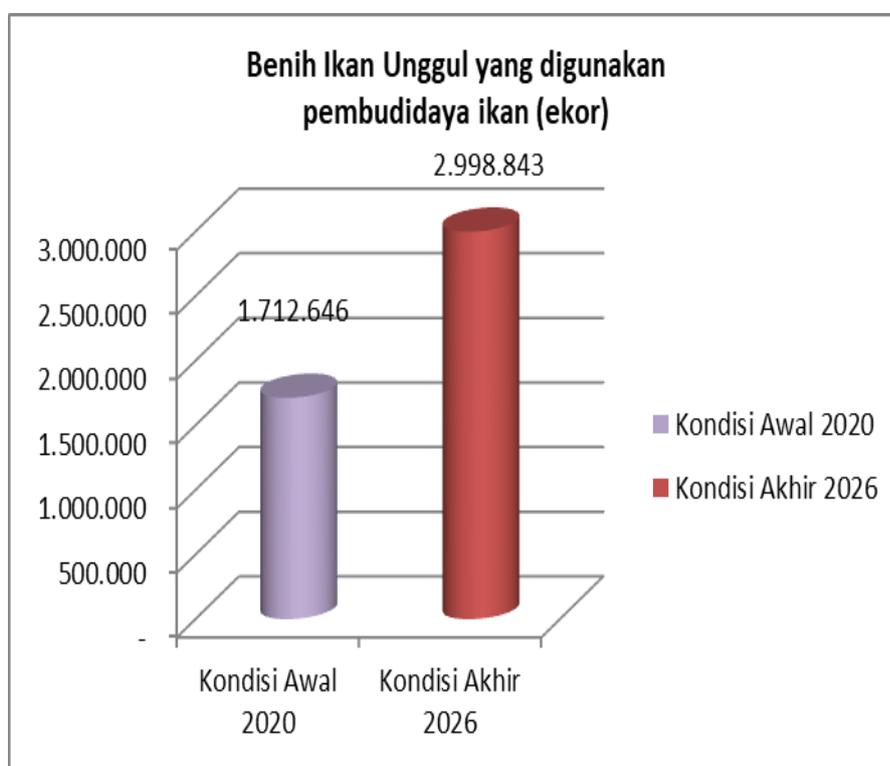


Data Dinas Perikanan Tahun 2020

d. Persentase Benih Ikan Unggul yang digunakan pembudidaya ikan

Penggunaan benih ikan unggul sangat di perlukan untuk menunjang keberhasilan pembudidayaan ikan. Kondisi saat ini penggunaan benih ikan unggul di Kabupaten Mukomuko lebih kurang 1.712.646 ekor. Hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya produksi perikanan budidaya. Pada akhir tahun 2026 target penggunaan benih ikan unggul lebih kurang 2.998.843 ekor.

Gambar 3.5

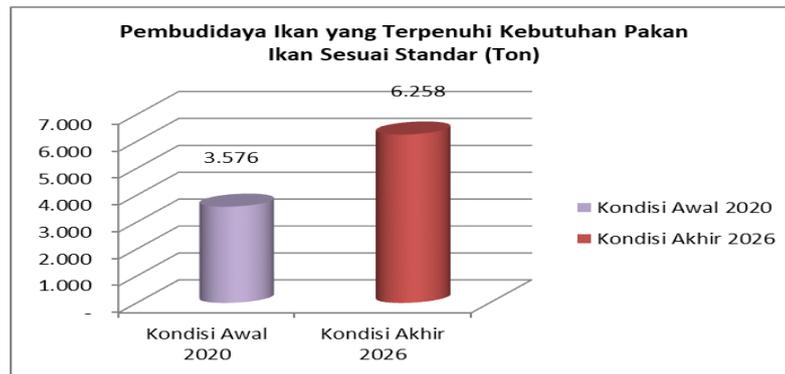


Data Dinas Perikanan Tahun 2020

e. Persentase Pembudidaya Ikan yang Terpenuhi Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar

Penggunaan pakan ikan sesuai standar sangat menentukan keberhasilan budidaya ikan. Kondisi saat ini, penggunaan pakan ikan sesuai standar oleh Rumah Tangga Pembudidaya (RTP) di Kabupaten Mukomuko lebih kurang 3.576 To. Pada akhir tahun 2026 penggunaan pakan ikan berstandar ditargetkan lebih kurang 6.258 Ton.

Gambar 3.6



Data Dinas Perikanan Tahun 2020

Sarana dan prasarana peralatan unit pembenihan rakyat sangat berpengaruh juga terhadap peningkatan produksi, dimana kondisi saat ini unit pembenihan rakyat (UPR) memiliki sarana prasarana pendukung pembenihan yang sangat minim sekali. Diharapkan kedepannya untuk dianggarkan pembiayaan sarana prasara pembenihan tersebut.

Tabel 3.5
Jumlah Unit Pembenihan dan Sarana yang dimiliki serta permasalahan

No.	Nama-nama UPR	Desa	Kecamatan	Sarana yang dimiliki	Permasalahan
1	BBI	Lubuk Pinang	Lubuk Pinang	Mesin Pakan Ikan Operasional 1 unit Kendaraan roda	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif
2	UPR Mina Abadi	Agung Jaya	Air Manjuto	Mesin Pakan ukuran 30 kg/jam 1 unit	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif
3	UPR Kurnia Jaya	Rawa Makmur	XIV Koto	Mesin pelet ukuran 50 kg/jam 1 unit	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif
4	UPR Mina Mentari	Rawa Mulya	XIV Koto	Mesin Pakan ukuran 30 kg/jam 1 unit	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif
5	UPR Lubuk Iele	Tirta Mulya	Air Manjuto	Mesin Pakan 300 kg/jam 1 unit	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif
6	UPR Mina Berkah	Lubuk Mukti	Penarik	-	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif
7	UPR jaya Bintang Sumatera	Sido Dadi	Penarik	-	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif
8	UPR F. Tri Koyo	Wono Sobo	Penarik	-	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif
9	UPR Mina Mulya	Lubuk Mukti	Penarik	-	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif
10	UPR Cinta Asih	Air rami	Air rami	-	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif

No.	Nama-nama UPR	Desa	Kecamatan	Sarana yang dimiliki	Permasalahan
11	UPR Sp7	Tirta Mulya	XIV Koto	-	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif
12	UPR mekar Mulya	Mekar Mul;ya	Penarik	Mesin Pakan ukuran 30 kg/jam 1 unit	Kurangnya Ketersediaan induk Produktif

Sumber data: Bidang Perikanan Budidaya 2020

Jumlah 12 Unit pembenihan terdapat 11 unit UPR yang masih pemula. Untuk mencapai tingkat produksi, perlunya peningkatan dan ketersediaan peralatan penunjang pembenihan. Dari Unit-unit pembenihan yang ada di Kabupaten Mukomuko akses untuk menghasilkan benih sangat lemah sehingga produksi ikan di Kabupaten Mukomuko tidak tercapai, Pencapaian target ketersediaan benih di Kabupaten Mukomuko, kelompok pembudidaya khususnya kelompok pembenihan sangat memerlukan peralatan penunjang pembenihan. Adapun kebutuhan peralatan penunjang pembenihan antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kebutuhan Peralatan Penunjang Pembenihan

Peralatan Pembenihan	Jumlah	
Terpal	120	600
Hi-blo	24	24
Termometer	60	60
Peralatan Hipofisasi	12	12
Pakan Buatan Alami	660	660
Fiber	24	24
Hiter	96	96
Induk lele betina UPR	480	480
Induk lele jantan UPR	125	125
Induk mas betina UPR	30	30
Induk mas jantan UPR	150	150
Induk nila betina BBI	700	700
Induk nila jantan BBI	350	350
Induk lele betina BBI	50	50
Induk lele BBI UPR	25	25
Guramai jantan UPR	30	30
Guramai betina UPR	30	30

Sumber data: Bidang Perikanan Budidaya 2020 (data di olah)

Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam meningkatkan program pengembangan budidaya baik perikanan maupun kelautan, sebagaimana sumber daya manusia yang mempunyai standar kompetensi dibidang perikanan dan kelautan sangat lemah dilihat dari data pegawai sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pegawai Yang memilikin Standar Kompetensi Ilmu Kelautan dan Perikanan

NO	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan	Yang memiliki Standar Kompetensi ilmu kelautan dan perikanan (orang)	Kebutuhan akan SDM yang Memiliki Standar Kompetensi ilmu kelautan dan perikanan (orang)
1.	Kepala bidang	2	2
2.	Kepala Seksi	3	7
3.	Staf	5	6
4.	Tenaga Penyuluh	2	13
Total		13	28

Permasalahan rendahnya produksi ikan juga dipengaruhi oleh ketersediaan pakan ikan. Tingginya kebutuhan pakan, pemerintah merangsang pembudidaya dalam membentuk koperasi. Melalui koperasi pokdakan akan mudah mengakses modal usaha serta melalui koperasi ketersediaan pakan yang sesuai dan harga pakanpun bisa lebih rendah karena dimungkinkan koperasi membeli dari pabrik pakan langsung yang akan merintis mata rantai distribusi dan sejenis perdagangan pakan sehingga memperpendek rantai tersebut. Kabupaten Mukomuko sampai saat ini memiliki kelompok pembudidaya binaan sebanyak 28 kelompok. Target pelayanan dinas terhadap peningkatan program perikanan budidaya kedepanya perlu penumbuhan badan hukum kelompok agar legalitas kelembagaan tertata baik.

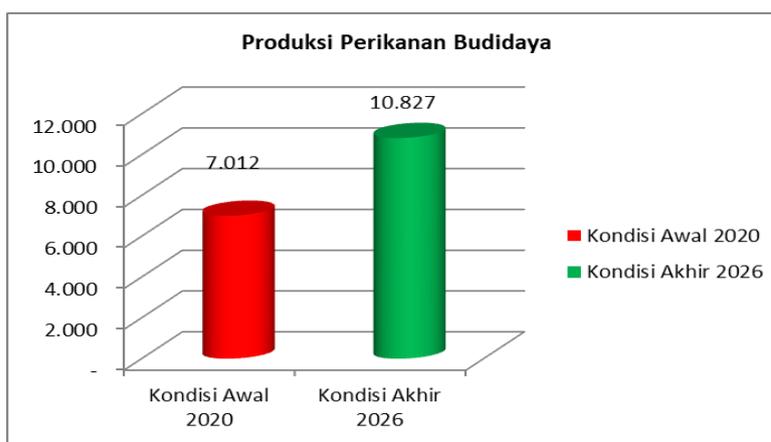
Tabel 3.8
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Mukomuko

NO.	JENIS IKAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nila	3.846	3.938	3.997	2.954	4.154	6.080	24.969
2.	Ikan mas	961	985	994	738	1.038	1.520	6.232

3.	Ikan Patin	481	492	497	369	519	760	3.118
4.	Ikan gurame	1.442	1.447	1.497	1.108	1.558	2.280	9.332
5.	Lainnya	2.884	2.954	2.983	2.215	3.115	4.560	18.711
	TOTAL	9.614,76	9.845	9.943	7.384	10.384	15.200	

Sumber data: Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2020.

Gambar 3.7
Target Produksi Perikanan Budidaya



Sumber data: Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2020

Identifikasi permasalahan bidang program pengembangan perikanan budidaya yang dihadapi sampai saat ini antara lain:

Isu Permasalahannya:

- Pemanfaatan lahan potensi budidaya belum optimal;
- Akses untuk mendapatkan benih berkualitas, masih lemah;
- Terbatasnya sumber daya manusia perikanan yang sesuai standar kompetensi perikanan;
- Kelembagaan petani pembudidaya masih lemah seperti kelompok pembudidaya belum memiliki koperasi;

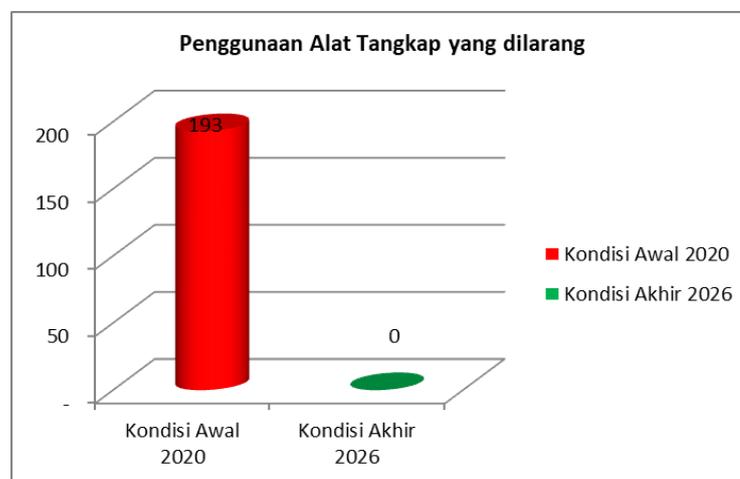
3.1.3. Permasalahan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Penggunaan Alat Tangkap yang dilarang

Tidak hanya dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing saja, tetapi juga dilakukan oleh kapal-kapal ikan di wilayah Kabupaten Mukomuko. Hal ini

tercermin dengan masih rendahnya tingkat kepatuhan kapal-kapal ikan akan aturan main dalam pengelolaan sumber daya ikan kurang lebih 60 % masih ada nelayan atau usaha perikanan tangkap yang menggunakan jenis - jenis alat tangkap atau bahan yang berbahaya dalam kegiatan operasi penangkapan ikan seperti pukat tarik, pukat hela. Secara nyata telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan, sehingga aktivitas ini dapat dinyatakan sebagai kendala utama untuk mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Nelayan yang masih memakai alat tangkap yang dilarang antara lain Pukat Trawls 193 Unit. Target pemerintah Kabupaten Mukomuko kedepannya tidak ada lagi penggunaan alat tangkap yang dilarang, untuk pencapaian target kinerja diharapkan penggantian akan alat tangkap tersebut. Dengan diberlakukan PERMEN KP Nomor 71/ PERMEN-KP/2016 tentang sumber daya ikan akan pulih dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan kedepannya. Gambaran target pemerintah untuk mengganti alat tangkap yang dilarang dapat tergambar pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.8



Data bidang perikanan tangkap 2020 (data di olah)

b. Minimnya sarana prasarana nelayan untuk melaut

Permasalahan dalam sub sektor perikanan tangkap hampir terjadi disemua pantai perairan, padahal indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Hal ini terjadi karena sebagian besar armada penangkapan ikan didominasi oleh ukuran kapal lebih kecil dari 5 GT. Kapal penangkapan 5

GT kebawah hanya mampu beroperasi diperairan pantai dibawah 4 mil. Jumlah nelayan Kabupaten Mukomuko dan Jenis armada dan Alat tangkap yang digunakan masih sangat minim dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Titik Sentral Pendaratan Ikan

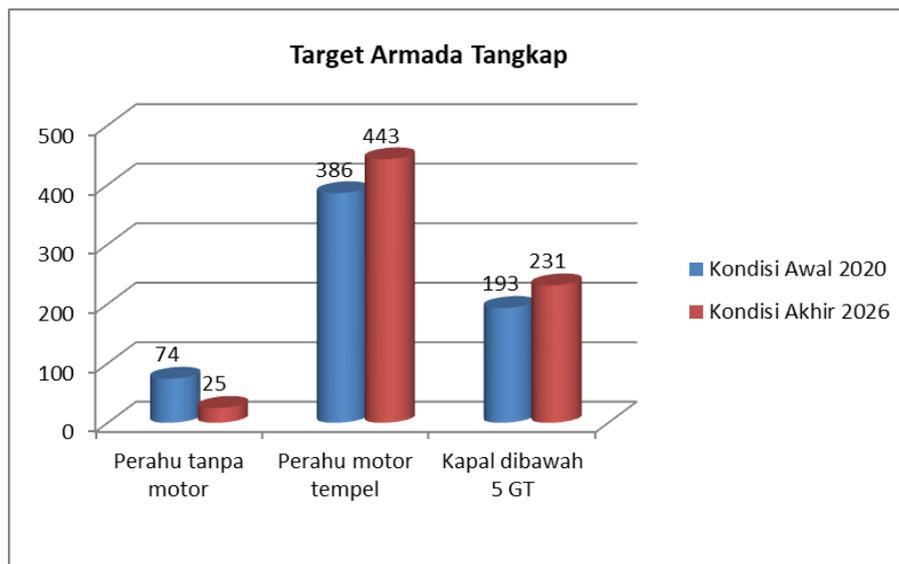
No	Kecamatan/Desa	Jumlah Nelayan
1	Kec Air Rami	144
2	Kecamatan Ipuh	270
3	Kecamatan Teramang jaya	304
4	Kecamatan Kota Mukomuko	458
5	Kecamatan XIV Koto	61
	Total	1237

Tabel 3.10
Jumlah Armada Tangkap 2012-2016

	Jenis Armada Alat Tangkap	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Perahu Tanpa Motor	14	15	18	18	74
2.	Perahu Motor Tempel	258	345	349	349	386
3.	Kapal Motor dibawah 5 GT	157	161	169	169	193
	Total	429	521	536	554	653

Sumber data bidang perikanan tangkap 2016 (data di olah)

Gambar 3.9



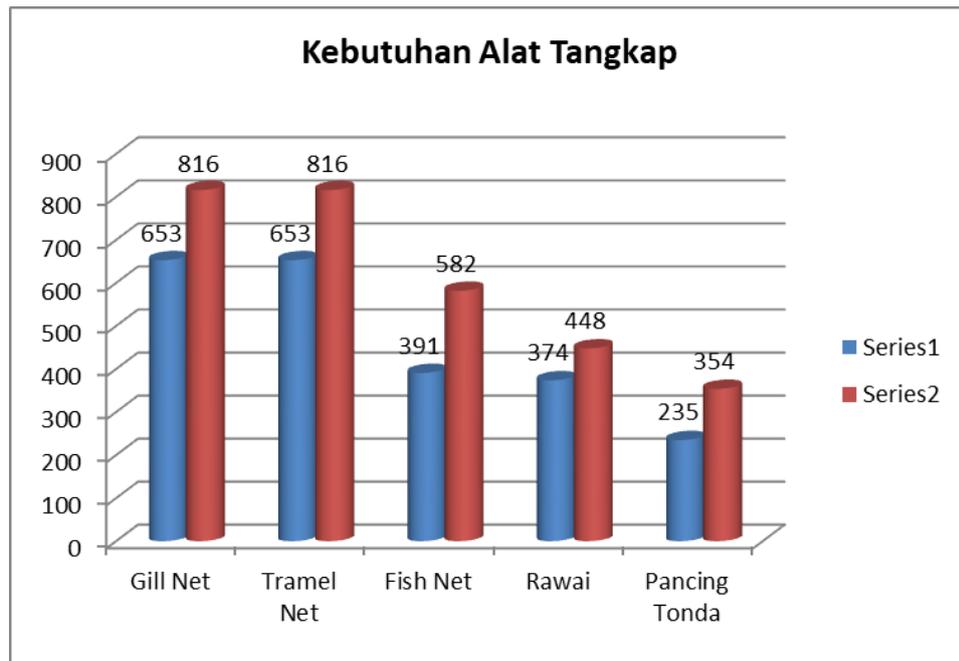
Data bidang perikanan tangkap 2020 (data di olah)

Tabel 3.11
Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Nelayan tahun 2012-2016

No	Jenis Alat Tangkap	2013	2014	2015	2019	2020
1	Gill Net	286	399	536	554	653
2	Tramel Net	286	399	536	554	653
3	Payang	12	17	20	20	25
4	Lore	286	399	321	334	435
5	Fish Net	171	239	321	340	391
6	Rawai	172	199	215	220	374
7	Pancing Tonda	114	165	187	194	235
8	Pukat Trawls	157	161	169	177	193

Data bidang perikanan tangkap 2020 (data di olah)

Gambar 3.11



Data bidang perikanan tangkap 2020 (data di olah)

Data Armada dan alat tangkap di atas dapat mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap, dilihat dari capaian kinerja peningkatan produksi perikanan 2020 - 2026 pada tabel dibawah ini:

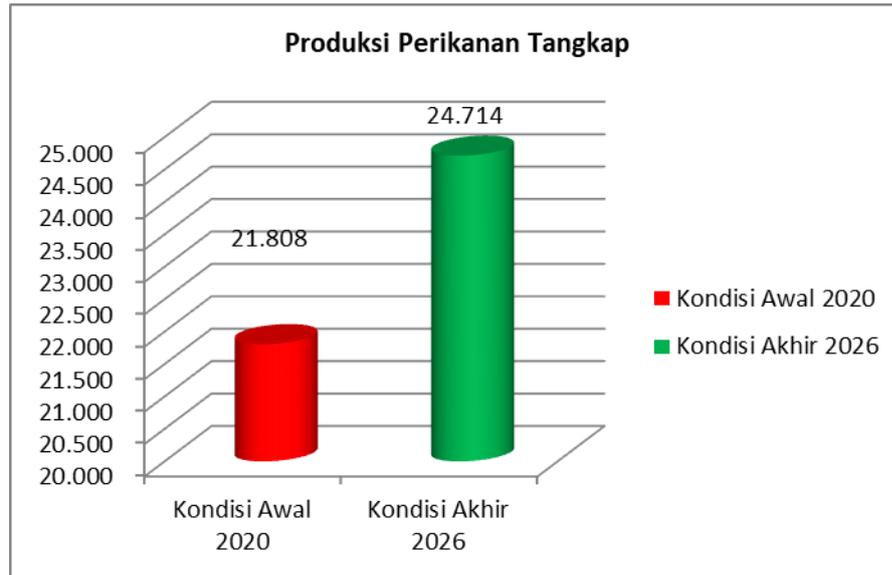
Tabel 3.12

Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Mukomuko

NO.	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ipuh	878.219	3.788.896	1.491.846	1.260.921
2.	Air rami	550.535	2.072.997	3.820.802	6.417.030
3.	Teramang jaya	2.875.346	8.442.003	8.649.660	7.302.114
4.	Kota Mukomuko	983.471	4.895.145	5.024.685	6.797.543
5.	Air Dikit	477	2.116	10.320	3.121
6.	XIV Koto	-	3.628	2.977	27.310
	TOTAL	5.288.048	19.201.157	19.000.290	21.808.039

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

Gambar: 3.12



Data bidang perikanan tangkap 2020 (data di olah)

Identifikasi permasalahan bidang program pengembangan perikanan tangkap yang dihadapi sampai saat ini antara lain:

Isu Permasalahan :

- Menindaklanjuti PERMEN –KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia;
- Penggunaan alat tangkap yang dilarang;
- Minimnya sarana dan prasarana nelayan untuk melaut;
- Masih rendahnya sumber daya manusia bidang perikanan tangkap.

3.1.4. Permasalahan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pogram ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta mayarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Pasal 67 mengamanatkan masyarakat dapat ikut serta dalam membantu pengawasan perikanan.

Kondisi wilayah Kabupaten Mukomuko yang terletak pada garis pantai sepanjang 91 KM sangat rentan terhadap pelanggaran berupa pengrusakan ekosistem pesisir, penangkapan ikan secara illegal, dan

pemanfaatan sumberdaya pesisir dan sumberdaya kelautan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di Kabupaten Mukomuko terdapat ikan Mikih yang merupakan jenis ikan endemik wilayah Kabupaten Mukomuko. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga kelestarian hidup ikan Mikih. Salah satu upaya yang di tempuh untuk menjaga kelestarian ikan Mikih yaitu dengan Domistikasi Ikan Mikih. Kendala yang dihadapi dalam upaya menjaga kelestarian ikan mikih adalah minimnya anggaran serta kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ikan jenis ini juga masih rendah.

Kesadaran dan penegakan hukum tentang pendayagunaan sumber daya laut sangat berperan penting terhadap kelestarian sumber daya laut, untuk itu sangat dibutuhkan sosialisasi atas peraturan dan perundang-undangan dalam pendayagunaan sumber daya laut. Sesuai target Dinas Perikanan mulai 2020 -2026 diharuskan masyarakat nelayan untuk mengikuti sosialisasi sebanyak 3000 orang.

Gambar 3.13



Data: Dinas Perikanan 2020

3.1.5. Permasalahan Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan.

a. Minimnya Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

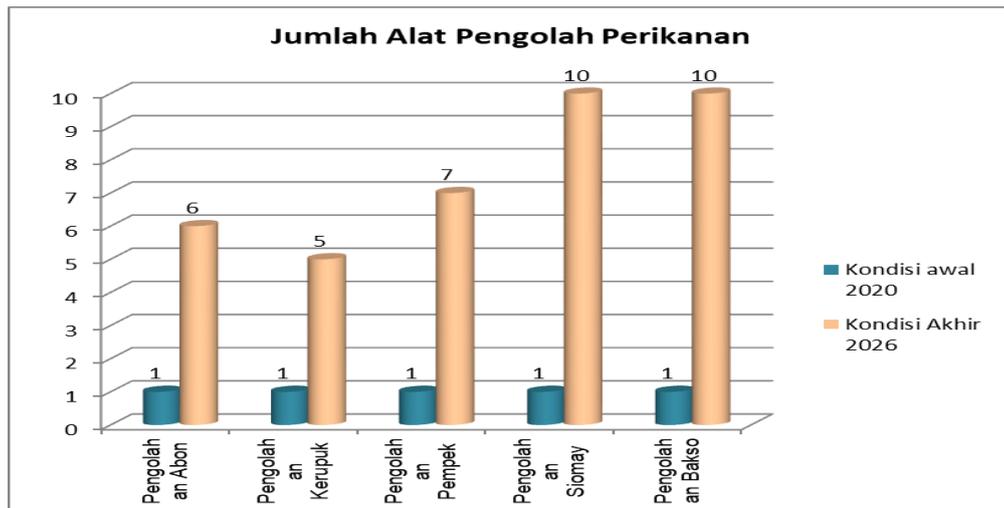
Dalam upaya memaksimalkan hasil perikanan dan memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi maka diperlukan pengolahan hasil perikanan untuk memperoleh nilai tambah produk perikanan. Peningkatan daya saing produk yang berkualitas dan higienitas akan mempermudah dalam pemasaran hasil produk perikanan. Hasil produk pengolahan yang saat ini diminati di Kabupaten Mukomuko dan cukup dikenal daerah lain adalah ikan teri tawar, beledang tawar, kase tawar, pempek, ikan asap, ikan asin kepala batu, ikan balato asin, ikan kering, kerupuk ikan, abon ikan, bakso ikan dan lain-lain. Jumlah pengolah ikan yang ada di kabupaten Mukomuko sebanyak 150 orang. Pencapaian hasil pengolahan ikan didukung dengan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan ikan dan peningkatan pengetahuan POKLAHSAR tentang pengembangan teknologi pengolahan ikan.

Tabel 3.13
Sarana dan Prasarana Pengolah Hasil perikanan

Program	Jumlah alat pengolahan	2016	2017	2018	2019	2020
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	waring	542	1665			
	Ice Cruiser		5		6	
	Pengolahan abon (set)					1
	Pengolahan kerupuk					1
	Pengolahan Pempek					1
	Pengolahan Siomay					1
	Pengolahan Bakso					1
	Cool Box					
	Pabrik Ice Flake				1	
	Los Pemasaran Ikan					

Sumber data Bidang PPUP 2016 (data di olah)

Gambar : 3.14



Sumber data Bidang PPUP 2020 (data di olah)

b. Pemasaran Hasil Perikanan

Sebagai proses produksi yang komersial, maka pemasaran hasil perikanan merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembangunan perikanan. Sistem pemasaran yang berfungsi dengan baik, ditunjukkan melalui harga, kecenderungan konsumen terhadap satu jenis komoditas dan nilai ekonomi yang menyertai kecenderungan tersebut. Peranan pemasaran hasil perikanan dalam mempertahankan produksi sangat penting sekali karena:

- Keberhasilan dalam mengatur pola produksi tergantung pada sistem pemasaran yang efektif untuk menjembatani permasalahan yang kompleks dalam kaitannya dengan permintaan dan penawaran pada sistem pemasaran;
- Pengetahuan pasar yang terperinci tentang dimana, kapan dan berapa jumlah produk yang dapat dijual adalah penting dalam menentukan produk perikanan mana yang akan dikembangkan.

Jumlah pemasar di Kabupaten Mukomuko terdiri dari Pedagang pengumpul sebanyak 10 (sepuluh) orang dan pedagang keliling sebanyak 251 orang. Pencapaian hasil kinerja kelompok pemasar perlu dukungan peralatan alat pemasaran.

Isu dan Permasalahannya:

- Minimnya modal bagi nelayan tradisional untuk mengembangkan

- hasil perikanan olahan.
- b. Kurangnya sarana pemasaran hasil perikanan.
 - c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi pengolahan pemasaran ikan.
 - d. Kurangnya minat masyarakat dalam melaksanakan peningkatan daya saing produk perikanan melalui diversifikasi pengolahan ikan.

Tabel 3.14
Sarana dan Prasarana Pemasar Hasil Perikanan 2017-2020

No	Jumlah Alat Pengolahan	2017	2018	2019	2020
1	Kios Pemasaran	11	2	2	6
2	Cool Box 100 liter	-	125	-	-
3	Cool Box 200 liter	-	-	71	-
4	Keranjang Ikan	-	-	980	-
5	Oven pengasapan	-	-	20	-
6	Styofom	-	-	680	-
7	Alat Pemasaran ikan hias	-	-	1	-

Sumber Dinas Perikanan 2020

Tabel 3.15
Perkembangan Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, serta Pengolahan dan Pemasaran Kabupaten Mukomuko

NO.	KLASIFIKASI KELOMPOK PERIKANAN	JUMLAH KELOMPOK							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)
Perikanan Budidaya									
1.	Pemula	10	13	15	18	19	20	23	25
2.	Lanjut	-	-	-	-	-	-		

NO.	KLASIFIKASI KELOMPOK PERIKANAN	JUMLAH KELOMPOK							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)
3.	Madya	-	-	-	-	-	-		
4.	Utama	-	-	-	-	-	-		
Perikanan Tangkap									
1.	Pemula	80	91	92	102	128	132	143	155
2.	Lanjut	-	-	-	-	-	-		
3.	Madya	-	-	-	-	-	-		
4.	Utama	-	-	-	-	-	-		
Pengolahan dan pemasaran									
1.	Pemula	179	181	186	251	261	261	58	60
2.	Lanjut	-	-	-	-	-	-		
3.	Madya	-	-	-	-	-	-		
4.	Utama	-	-	-	-	-	-		

Sumber data: Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, 2020.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yaitu:

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq) ”

Untuk mencapai Visi tersebut dilaksanakan melalui 5 Misi, yaitu:

1. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agroindustri,

- perdagangan Hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan;
2. Meningkatkan mutu pembelajaran yang berbasis pada Iptek melalui Peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru, yang didukung Oleh sarana dan prasarana yang berstandar pada standar pendidikan Nasional;
 3. Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah Dan Transparan;
 4. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan setiap elemen Masyarakat;
 5. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai daerah yang peduli dan Mensinkronkan pembangunan bidang Iptek dan Imtaq;

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, maka dipaparkanlah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perikanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.16
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)					
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih		Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Misi 1	Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan Hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan;	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Minimnya Ketersediaan Anggaran untuk penyediaan Sarana dan Prasarana di Dinas Perikanan	Terpenuhinya Saranan dan Prasaranan yang Mendukung dan SDM

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih		Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
				Kurangnya SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi dan Skill	Pelatihan penggunaan teknologi perikanan Memberi Peluang Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur,
				Belum Optimalnya Validasi data, Pengadministrasian Data dan Pengarsipan Data Untuk Penyusunan rencana kerja	Peningkatan Pola Kerja, Hubungan Kerja dan Koordinasi Peningkatan Sarana dan Prasarana
				Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Teknologi Perikanan	Memiliki Kewenangan Dalam Merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi suatu bahan perumusan isu pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko.

3.3 Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut ini.

Tabel 3.17

Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Berdasarkan Renstra Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pananganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Bapelitbangd	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	<p>Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko</p> <p>Belum Optimalnya Validasi dan Sinkronisasi Data, Pengadministrasian Data dan Pengarsipan Data untuk Penyusunan, Updating, evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Belum Tertatanya Kearsipan Data, Baik Data Perencanaan Kegiatan Maupun Data Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>Penempatan SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi dan Skill Belum Sesuai dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja</p> <p>Sulitnya Mendapatkan Data yang Akurat Dalam Penyusunan Perencanaan</p> <p>Kurangnya Sarana dan Prasaran Pengarsipan</p>	<p>1. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Memungkinkan Dinas Perikanan Untuk Melaksanakan pengelolaan sumberdaya perikanan yang Terarah, Tertata, Terkoordinir Sesuai dengan Peraturan serta Tepat Sasaran</p> <p>2. Pelatihan Teknologi Perikanan Memberi Peluang Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur.</p> <p>3. Peningkatan Pola Kerja, Hubungan Kerja dan Koordinasi</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Bapelitbangd	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Belum Optimalnya Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan perikanan	Kurangnya ketersediaan anggaran untuk	4.Peningkatan Sarana dan Pasarana 5.Memiliki Kewenangan Dalam Merumuskan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan
		Belum Optimalnya pengelolaan perikanan Berbasis teknologi		
		Belum Optimalnya kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Belum Optimalnya kesadaran pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	
		Belum Optimalnya peningkatan kapasitas SDM pelaku perikanan	Belum Optimalnya perubahan pola pikir/gaya hidup pelaku perikanan	

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan/wilayah.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus memperhatikan aspek perikanan, disisi lain dalam paradigma sehat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk peruntukan tata ruang. Pembangunan aspek perikanan dipastikan tidak akan melanggar rencana tata ruang wilayah.

Pembangunan suatu daerah harus memperhatikan potensi yang dimiliki, baik potensi internal maupun potensi eksternal. Secara internal,

potensi pembangunan meliputi potensi daerah yang meliputi, demografi, geografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika dilihat dari aspek objeknya, potensi demografi dikategorikan sebagai potensi Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan potensi geografis dan kekayaan alam sebagai potensi Sumber Daya Alam (SDA), sedangkan potensi lainnya, yang disebutkan diatas, termasuk potensi sumber daya buatan.

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) adalah seluruh kandungan potensi yang terdapat baik itu di darat, laut maupun udara. Sedangkan potensi Sumber Daya Buatan merupakan sintesis dari pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.

Jika dilihat secara eksternal, pembangunan daerah diarahkan mengacu kepada isu perdagangan global. Potensi suatu daerah harus juga dilihat dari prospek yang dapat dimasuki di pasar global. Secara umum potensi-potensi global tersebut dapat dimanfaatkan bagi setiap daerah, untuk pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan sosial budaya.

Dilihat dari persepektif pembangunan, Kabupaten Mukomuko mempunyai beberapa kendala, dalam melaksanakan pembangunannya. Kendala-kendala tersebut adalah :

- 1) Secara geografis Kabupaten Mukomuko terletak terletak di pantai barat pulau sumatera, dan derhadapan langsung dengan Samudra Hindia, memiliki banyak Daerah Aliran Sungai (DAS), lahan bergambut, 32,5% dari luas wilayah adalah Hutan Lindung dan merupakan Kabupaten terjauh dari Ibu Kota Propinsi;
- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah dikarenakan terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan;
- 3) Sarana dan prasarana dalam wilayah yang belum memadai seperti jaringan listrik, transportasi dan komunikasi;
- 4) Kegiatan ekonomi lokal belum berkembang baik dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi sehingga membatasi masyarakat terhadap permodalan, pasar, informasi dan teknologi;
- 5) Masih rendahnya kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam

membayai pembangunan dikarenakan masih rendahnya penerimaan dari PAD.

Adapun Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perikanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perikanan ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga dapat dilihat pada Tabel 3.17 pada halaman Bab III-22 diatas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang antara lain:

a. Isu Lingkungan

Isu yang muncul pada isu lingkungan merupakan indikasi dibutuhkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan untuk menjaga sumber daya perikanan di Kabupaten Mukomuko isu-isu yang teridentifikasi adalah:

- Pemanfaatan sumber daya kelautan yang kurang bertanggung jawab seperti pemakaian alat tangkap yang dilarang pemerintah.
- Overfishing akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada satu tempat dapat mengakibatkan perselisihan .
- Kondisi alam dan musim yang sulit diperkirakan sebagai dampak dari perubahan iklim global.

b. Isu Kelembagaan

Isu yang muncul pada isu kelembagaan terkait dengan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan yang belum optimal. Isu-isu yang teridentifikasi adalah:

- Perlunya penguatan kapasitas kelompok atau pelaku usaha bidang perikanan.
- Perlunya penguatan kapasitas teknis di lapangan.

c. Isu Infrastruktur

Isu infrastruktur terkait belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan produksi, sistem informasi dan distribusi hasil perikanan. Isu-isu yang teridentifikasi adalah:

- Perlunya restrukturisasi armada tangkap karena masih didominasi oleh nelayan kecil dengan alat tangkap dan armada yang relatif sederhana.
- Lemahnya akses permodalan dan pasar dalam rangka pengembangan usaha.
- Terbatasnya prasarana tambak labuh untuk nelayan kecil.

d. Isu Ketahanan Pangan

Isu ini muncul dibidang budidaya perikanan dikarenakan untuk mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan adanya peningkatan produksi budidaya perikanan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dari perikanan tangkap pemenuhan kebutuhan produksi tidak dapat dipastikan karena kondisi alam dan musim yang sulit diperkirakan dampak dari perubahan iklim global. Isu yang teridentifikasi adalah:

- Tingginya harga pakan mengakibatkan tingginya biaya produksi.
- Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu.
- Perlunya pengembangan budidaya ikan skala kecil rumah tangga.
- Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil perikanan.
- Kurangnya kepatuhan/ketaatan penerapan standar mutu pada pengolahan ikan (UPI).
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan usaha perikanan budidaya.
- Harga komoditas cenderung turun, nelayan atau pembudidaya ikan merugi.
- Kurangnya nelayan menangani ikan hasil tangkapan ikan secara baik.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, faktor penghambat dan pendorong serta permasalahan pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan dapat dilihat pada isian Tabel 3.18 berikut ini.

TABEL 3.18

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan
			Internal (Kewenangan Dinas Perikanan)	Eksternal (di Luar Kewenangan Dinas Perikanan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan Produksi Perikanan	<i>Produksi perikanan tangkap</i>	PERMEN -KP Nomor 7/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok	<i>Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupate, selalu berusaha untuk meningkatkan produksi perikanan</i>	1. Jika ada perubahan regulasi teknis dalam pengelolaan Sumberdaya perikanan 2. Jika ada perubahan prioritas program pembangunan Serta Terjadinya Kondisi Bencana maupun Pandemi	1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan 2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pelaku perikanan
	<i>Kondisi awal Tahun 2021 21.808 Ton</i>				
	<i>Target Akhir Tahun 2026 118.817 Ton</i>				
	<i>Produksi perikanan budidaya</i>				
	<i>Kondisi awal Tahun 2021 7012 Ton</i>				
	<i>Target Akhir Tahun 2026 144.235 Ton</i>				

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko

Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko sebagai Organisasi Perangkat Daerah, yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mukomuko yaitu: *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq) “* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko tahun 2021-2026.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kepala daerah dengan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

Visi Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 - 2026	Tujuan Kepala Daerah
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq) “	“Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Merata dan Didukung oleh Pengembangan Infrastruktur Ekonomi”

Misi Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026	Sasaran Kepala Daerah
1. Menjadikan kabupaten mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan;	“Penurunan Angka Kemiskinan”
2. Meningkatkan mutu pembelajaran yang berbasis pada Iptek melalui Peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru, yang didukung Oleh sarana dan prasarana yang berstandar pada standar pendidikan Nasional;	
3. Menjalankan Pemerintahan Yang Profesional, Amanah Dan Transparan;	
4. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan setiap elemen Masyarakat;	
5. Menjadikan Kabupaten Mukomuko sebagai daerah yang peduli dan Mensinkronkan pembangunan bidang Iptek dan Imtaq;	

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah diatas, maka tujuan dan sasaran Kepala Daerah dengan Cascading Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diuraikan sebagai berikut :

☐	Visi Kepala Daerah		Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)
☐	Misi 1 Kepala Daerah		Menjadikan Kabupaten Mukomuko Sebagai Pusat Agroindustri, Perdagangan Hasil Pertanian, Serta Perikanan Dan Kelautan;
☐	Tujuan Kepala Daerah	:	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Merata dan Didukung oleh Pengembangan Infrastruktur Ekonomi
☐	Sasaran Kepala Daerah	:	Meningkatnya pertumbuhan sector unggulan dalam perekonomian daerah
	Tujuan 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD
	Sasaran 1.1	:	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD
	Tujuan 2	:	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah
	Sasaran 2.1	:	Meningkatnya produksi perikanan

Lebih jelasnya, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1
Sinkronisasi Tujuan Sasaran Kepala Daerah dengan
Cascading Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko

- VISI** : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq)
- MISI 1** : Menjadikan Kabupaten Mukomuko Sebagai Pusat Agroindustri, Perdagangan Hasil Pertanian, Serta Perikanan Dan Kelautan
- TUJUAN KEPALA DAERAH** : Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Merata dan Didukung oleh Pengembangan Infrastruktur Ekonomi
- SASARAN KEPALA DAERAH** : Meningkatnya pertumbuhan sector unggulan dalam perekonomian daerah

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					URUSAN	PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan	7 Jenis Kegiatan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Perikanan				
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%	100%	100%	100%	100%		

					Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%		
					Persentase ASN yang Disiplin	Persentase ASN yang Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%		
					Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	85%	90%	96%	100%		
Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap	Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap	33,54%	37,41%	38,70%	40%	42,58%	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
					Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan	Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan	10,88%	14,51%	18,14%	20,31%	23,22%		

					Ikan Sesuai Standar	Ikan Sesuai Standar								
					Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan kecil yang di Tingkatkan Keterampilannya	Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan kecil yang di Tingkatkan Keterampilannya	2,95%	4,93%	7,39%	9,86%	12,32%			
					Persentase Nelayan yang Mempunyai Kartu Kusuka	Persentase Nelayan yang Mempunyai Kartu Kusuka	40,00%	48,00%	57,60%	75,00%	95,00%			
					Persentase Perkembangan Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap	Persentase Perkembangan Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap	41,93%	54,83%	70,96%	85,16%	100%			
			Produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin	%	%	22%	33%	44%	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	
					Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya	2%	5%	8%	11%	14%			

					Persentase Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Benih Ikan Unggul	Persentase Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Benih Ikan Unggul	19%	28%	38%	49%	63%		
					Persentase Benih Ikan Unggul yang digunakan pembudidaya ikan	Persentase Benih Ikan Unggul yang digunakan pembudidaya ikan	5%	10%	15%	20%	75%		
					Persentase Pembudidaya Ikan yang Terpenuhi Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar	Persentase Pembudidaya Ikan yang Terpenuhi Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar	5%	10%	15%	20%	75%		
			Produksi perikanan tangkap	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	33,33%	50%	66,66%	83,33%	100%	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan

				Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Pengolahan Hasil Perikanan	18%	19%	20%	21%	22%	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
					Persentase Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pemasaran Hasil Perikanan	18%	19%	20%	21%	22%		
					Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	5%	11%	16%	21%	26%		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran Kepala Daerah dengan Cascading Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, maka Strategi dan Kebijakan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

☐	Visi Kepala Daerah	:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq);
☐	Misi 1 Kepala Daerah		Menjadikan kabupaten mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan;
☐	Tujuan Kepala Daerah		Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Merata dan Didukung oleh Pengembangan Infrastruktur Ekonomi
☐	Sasaran Kepala Daerah		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dalam perekonomian daerah
	Tujuan 1	:	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD
	Sasaran 1.1	:	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD
	Strategi 1.1	:	Meningkatkan Implementasi SAKIP
	Arah Kebijakan 1.1	:	Peningkatan SDM Aparatur
	Arah Kebijakan 1.2	:	Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tujuan 2	:	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah
	Sasaran 2.1	:	Meningkatnya Produksi Perikanan
	Strategi 2.1	:	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi Perikanan

Strategi 2.2	:	Peningkatan akses permodalan dan kemudahan investasi
Strategi 2.3	:	Peningkatan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perikanan
Arah Kebijakan 2.1	:	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber daya perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi
Arah Kebijakan 2.2	:	Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan mikro bagi pelaku usaha
Arah Kebijakan 2.3	:	Peningkatan kapabilitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha perikanan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel. 5.1

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko Yang Maju, Mandiri, Berkarakter Dan Sejahtera Berbasis Agro, Perikanan Dan Berilmu Pengetahuan & Teknologi (Iptek) Serta Beriman & Bertaqwa (Imtaq);		
Misi 1 Kepala Daerah	Menjadikan kabupaten mukomuko sebagai pusat agroindustri, perdagangan hasil pertanian, serta perikanan dan kelautan;		
Tujuan Kepala Daerah	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Merata dan Didukung oleh Pengembangan Infrastruktur Ekonomi		
Sasaran Kepala Daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan dalam perekonomian daerah Kemiskinan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Meningkatkan Implementasi SAKIP	Peningkatan SDM Aparatur
			Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

			Daerah
Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Produksi Perikanan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi Perikanan dan perubahan perilaku keluarga pelaku usaha perikanan	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber daya perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi
		Peningkatan akses permodalan dan kemudahan investasi	Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan mikro bagi pelaku usaha
		Peningkatan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perikanan	Peningkatan kapabilitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha perikanan
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi Perikanan dan perubahan perilaku keluarga pelaku usaha perikanan	Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber daya perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERIKANAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran- sasaran misi yang telah ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1. halaman BAB VI- 2.

TABEL 6
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Pada Akhir Renstra						
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai Sakip	C	B		BB		BB		A		A		A						
	Sasaran : Meningkatkan tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan	Nilai Sakip	CC	B		BB		BB		A		A		A						
3	25	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang di laksanakan	Jumlah/Jenis Kegiatan	4 Jenis Kegiatan	7 Jenis Kegiatan	3,719,584,312	7 Jenis Kegiatan	3,725,023,481	7 Jenis Kegiatan	3,730,473,528	7 Jenis Kegiatan	4,135,934,475	7 Jenis Kegiatan	4,141,406,344	7 Jenis Kegiatan	19,452,422,138	Dinas Perikanan
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	90%	90%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Perikanan
					Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Perikanan
					Persentase ASN yang Disiplin	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Perikanan
					Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	80%	80%		85%		90%		96%		100%		100%		100%	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	Persen	100%	100%	24,000,000	100%	24,000,000	100%	24,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	132,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	3 Dokumen	15,000,000	3 Dokumen	75,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	0	-	0	-	0	-	2	6,000,000	2	6,000,000	2 Dokumen	12,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9,000,000	2 Dokumen	9,000,000	2 Dokumen	9,000,000	2 Dokumen	9,000,000	2 Dokumen	9,000,000	2 Dokumen	45,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan	Nilai Sakip	C	B	2,910,584,312	BB	2,916,023,481	BB	2,921,473,528	A	2,944,934,475	A	2,950,406,344	A	14,643,422,138	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,719,584,312	12 Bulan	2,725,023,481	12 Bulan	2,730,473,528	12 Bulan	2,735,934,475	12 Bulan	2,741,406,344		13,652,422,138	Dinas Perikanan

Kode					Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Pada Akhir Renstra	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	186,000,000	12 Bulan	186,000,000	12 Bulan	186,000,000	12 Bulan	195,000,000	12 Bulan	195,000,000	948,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	7,000,000	29,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Dokumen	2 Dokumen	0	-	0	-	0	-	2 Dokumen	7,000,000	2 Dokumen	7,000,000	14,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai	Persen	100%		-	-	100%	22,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	152,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jenis	100%	0	-	0	-	0	-	2 Jenis	10,000,000	2 Jenis	10,000,000	4 Jenis	20,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7 Orang	0	-	0	-	2 Orang	22,000,000	5 Orang	55,000,000	5 Orang	55,000,000	12 Orang	132,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	Jumlah Layanan	9 Layanan	9 Layanan	183,620,000	9 Layanan	189,000,000	9 Layanan	179,620,000	9 Layanan	317,620,000	9 Layanan	317,620,000	9 Layanan	1,187,480,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jenis	9 Jenis	3 Jenis	7,000,000	3 Jenis	7,000,000	5 Jenis	10,000,000	5 Jenis	15,000,000	5 Jenis	15,000,000	8 Jenis	54,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	27 Jenis	10 Jenis	10,000,000	10 Jenis	10,000,000	10 Jenis	10,000,000	10 Jenis	20,000,000	10 Jenis	20,000,000	10 Jenis	70,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga lainnya	Jenis	19 Jenis	8 Jenis	8,820,000	8 Jenis	8,000,000	8 Jenis	8,000,000	12 Jenis	15,000,000	12 Jenis	15,000,000	12 Jenis	54,820,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	7 Jenis	7 Jenis	10,000,000	7 Jenis	10,000,000	7 Jenis	10,000,000	7 Jenis	20,000,000	7 Jenis	20,000,000	7 Jenis	70,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	9 Jenis	9 Jenis	10,000,000	9 Jenis	15,000,000	9 Jenis	7,000,000	9 Jenis	20,000,000	9 Jenis	20,000,000	9 Jenis	72,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	19,800,000	2 Jenis	21,000,000	2 Jenis	21,000,000	2 Jenis	23,000,000	2 Jenis	23,000,000	2 Jenis	107,800,000	Dinas Perikanan

Kode					Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Pada Akhir Renstra	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7,000,000	7 Jenis	7,000,000	7 Jenis	7,000,000	7 Jenis	15,000,000	7 Jenis	15,000,000	7 Jenis	51,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		136 Kali	90 Kali	30,000,000	90 Kali	30,000,000	70 Kali	25,620,000	120 Kali	40,000,000	120 Kali	40,000,000	510 Kali	165,620,000	Dinas Perikanan
						Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		16 Kali	16 Kali	81,000,000	16 Kali	81,000,000	16 Kali	81,000,000	25 Kali	149,620,000	25 Kali	149,620,000	318 Kali	542,240,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	9 Jenis	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	12,620,000	-	8 Jenis	100,000,000	8 Jenis	100,000,000	8 Jenis	232,620,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja dan Kursi	Jenis	2 Jenis	0	-	0	-	0	4 Jenis	60,000,000	4 Jenis	60,000,000	4 Jenis	120,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	7 Jenis	2 Jenis	20,000,000	2 Jenis	12,620,000	0	4 Jenis	40,000,000	4 Jenis	40,000,000	4 Jenis	112,620,000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan	3 Layanan	3 Layanan	504,380,000	3 Layanan	506,380,000	3 Layanan	506,380,000	3 Layanan	533,380,000	3 Layanan	533,380,000	3 Layanan	2,583,900,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lembar	321 Lembar	138 Lembar	1,380,000	138 Lembar	1,380,000	138 Lembar	1,380,000	138 Lembar	1,380,000	138 Lembar	1,380,000	690 Lembar	6,900,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	95,000,000	12 Bulan	97,000,000	12 Bulan	97,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	489,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	34 Orang	34 Orang	408,000,000	34 Orang	408,000,000	34 Orang	408,000,000	36 Orang	432,000,000	36 Orang	432,000,000	36 Orang	2,088,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan	2 Jumlah Layanan	3 Jumlah Layanan	77,000,000	2 Jumlah Layanan	77,000,000	3 Jumlah Layanan	77,000,000	2 Jumlah Layanan	145,000,000	3 Jumlah Layanan	145,000,000	3 Jumlah Layanan	521,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	70,000,000	2 Jenis	70,000,000	2 Jenis	70,000,000	2 Jenis	100,000,000	2 Jenis	100,000,000	2 Jenis	410,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	3 Jenis	3 Jenis	7,000,000	3 Jenis	7,000,000	3 Jenis	7,000,000	3 Jenis	15,000,000	3 Jenis	15,000,000	3 Jenis	51,000,000	Dinas Perikanan

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Pada Akhir Renstra							
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	2 Gedung	0	-	0	-	0	-	1 Gedung	30,000,000	1 Gedung	30,000,000	2 Gedung	60,000,000	Dinas Perikanan	
					Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan																	
					Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	31%	32%	34%	35%	37%	38%	38%	38%	38%	38%	38%	38%	38%	-	
					Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan tangkap	Ton	21,808	22,832	23,288	23,754	24,229	24,714	24,714	24,714	24,714	24,714	24,714	24,714	118,817	-	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap	%	50 Kelompok	33.54%	335,000,000	37.41%	360,000,000	38.70%	420,000,000	40%	705,000,000	42.58%	755,000,000	42.58%	2,575,000,000	Dinas Perikanan	
						Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan Ikan Sesuai Standar	%	50 Unit	10.88%		14.51%		18.14%		20.31%		23.22%		23.22%		-	Dinas Perikanan
						Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan kecil yang di Tingkatkan Keterampilannya	%	0 Orang	2.95%		4.93%		7.39%		9.86%		12.32%		12.32%		-	Dinas Perikanan
						Persentase Nelayan yang Mempunyai Kartu Kusuka	%	400 Orang	40.00%		48.00%		57.60%		75.00%		95.00%		95.00%		-	Dinas Perikanan
						Persentase Perkembangan Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap	%	45 Kelompok	41.93%		54.83%		70.96%		85.16%		100%		100%		-	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dilusahkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	20.808 ton	2%	222,000,000	4%	119,500,000	6%	245,000,000	8%	450,000,000	10%	360,000,000	30%	1,396,500,000	Dinas Perikanan	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Penyediaan peralatan penangkapan ikan	Jenis	13 Jenis	4 Jenis	212,000,000	4 Jenis	112,500,000	4 Jenis	230,000,000	4 Jenis	205,000,000	4 Jenis	325,000,000	4 Jenis	1,084,500,000	Dinas Perikanan	
						Jumlah Pembangunan Balai Nelayan Koto Jaya	Paket	1							1 Paket	230,000,000			1 Paket	230,000,000	Dinas Perikanan	

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Pada Akhir Renstra						
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah pengadaan Sarana Usaha penangkapan ikan	Unit	14	2 Unit	10,000,000	1 Unit	7,000,000	3 Unit	15,000,000	3 Unit	15,000,000	5 Unit	35,000,000	15 Unit	82,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	20.808 ton	2%	73,000,000	4%	90,500,000	6%	135,000,000	8%	215,000,000	10%	325,000,000	30%	838,500,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	0	0	-	0	-	0	-	30 Orang	50,000,000	60 Orang	120,000,000	90 Orang	170,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB penerima bantuan fasilitas badan hukum	Kelompok	45	6 Kelompok	22,500,000	7 Kelompok	30,000,000	8 Kelompok	35,000,000	10 Kelompok	40,000,000	12 Kelompok	55,000,000	43 Kelompok	182,500,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Biyayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah keikutsertaan Kartu Kusuka/asuransi nelayan/BPJS	Orang	1014	400 Orang	50,500,000	470 Orang	60,500,000	600 Orang	100,000,000	700 Orang	125,000,000	800 Orang	150,000,000	3000 Orang	486,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang sudah dikelola	unit	3 Unit	0	-	1	110,000,000	0	-	0	-	0	-	4 Unit	110,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pengadaan fasilitas penyelenggaraan aktifitas TPI	Unit	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rehabilitasi TPI Pulau Makmur	Unit	1	1 Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Dinas Perikanan
						Pembangunan TPI Kota Jaya	Unit	0	0	-	1 Unit	110,000,000	0	-	0	-	-	-	1 Unit	110,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perahu/kapal yang sudah registrasi	Unit	50 Unit	50 Unit	40,000,000	50 Unit	40,000,000	50 Unit	40,000,000	50 Unit	40,000,000	100 Unit	70,000,000	300 unit	230,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.04		Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendaftaran Buku Pas kecil	Unit	0	50 Unit	40,000,000	50 Unit	40,000,000	50 Unit	40,000,000	50 Unit	40,000,000	100 Unit	70,000,000	300 Unit	230,000,000	Dinas Perikanan
					Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	31%	32%		34%		35%		37%		38%		38%		-

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Pada Akhir Renstra						
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
3	25	04	204		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	7012 Ton	5%	510,000,000	7%	500,000,000	9%	300,000,000	11%	450,000,000	13%	465,000,000	45%	2,225,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	204	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi Pembudidayaan ikan	Dokumen	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	100,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	204	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jenis	10	3	Rp190,000,000	3	Rp200,000,000	3	Rp135,000,000	3	Rp170,000,000	3	Rp170,000,000	3	865,000,000	Dinas Perikanan
						Jumlah penyediaan sarana dan prasarana konservasi dan domestikasi ikan mikih	Jenis	0	5	Rp35,000,000	2	Rp30,000,000	2	Rp30,000,000	2	Rp30,000,000	2	Rp30,000,000	5	155,000,000	Dinas Perikanan
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pakan Alami	Paket	0	1	Rp20,000,000									1	20,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	204	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jenis	5	3	Rp175,000,000	3	Rp180,000,000	3	Rp100,000,000	3	Rp160,000,000	3	Rp175,000,000	5	790,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	204	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	Jenis	0	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	75,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	204	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pelaksanaan Temu Teknis Pembudidayaan Ikan	Kali	0	1	55,000,000	1	55,000,000			1	55,000,000	1	55,000,000	4	220,000,000	Dinas Perikanan
					Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	31%	32%		34%		35%		37%		38%		38%	-	
					Sasaran : Meningkatkan Produksi Perikanan	Produksi perikanan tangkap	Ton	21,808	22,832		23,288		23,754		24,229		24,714		118,817	-	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	%	3 Kali	33.33%	Rp 65,000,000	50%	Rp 65,000,000	66.66%	Rp 80,000,000	83.33%	Rp 95,000,000	100%	Rp 95,000,000	100%	400,000,000	Dinas Perikanan

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Pada Akhir Renstra									
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
3	25	05	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Airtanahnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencegahan illegal fishing dalam mempertahankan pendapatan masyarakat pesisir	kali	3 kali	3 kali	Rp 65,000,000	3 kali	Rp 65,000,000	5 kali	Rp 80,000,000	5 kali	Rp 95,000,000	5 kali	Rp 95,000,000	21 kali	400,000,000	Dinas Perikanan				
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan illegal Fishing	Kali	3 kali	3 Kali	Rp 65,000,000	3 Kali	Rp 65,000,000	5 Kali	Rp 80,000,000	5 Kali	Rp 95,000,000	5 Kali	Rp 95,000,000	21 Kali	400,000,000	Dinas Perikanan			
					Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	31%	32%		34%		35%		37%		38%	38%		-				
					Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan tangkap	Ton	21,808	22,832		23,288		23,754		24,229		24,714		118,817		-			
3	25	06			Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pengolahan Hasil Perikanan	Persen	438.221 kg/tahun	18%		450,000,000	19%		475,000,000	20%		600,000,000	21%	#VALUE!	22%	#VALUE!	22%	#VALUE!	Dinas Perikanan
						Persentase Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	6.198.053 kg/tahun	18%			19%		20%		21%		22%		22%		22%		Dinas Perikanan
						Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	Persen	57,77 kg/tahun	5%			11%		16%		21%		26%		26%		26%		Dinas Perikanan
3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Jumlah Pelaku Usaha yang Diberdayakan	Persen	28%	38%		50,000,000	48%		55,000,000	60%		62,000,000	77%	100,000,000	92%	86,000,000	92%	353,000,000	Dinas Perikanan
3	25	6	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi dan produk-produk perikanan	Kali	3 Kali	2 Kali		30,000,000	2 Kali		33,000,000	2 Kali		36,000,000	2 Kali	60,000,000	2 Kali	50,000,000	10 Kali	209,000,000	Dinas Perikanan
						Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Akta Notaris Berbadan Hukum	Kelompok	17 kelompok	6 Kelompok		20,000,000	6 Kelompok		22,000,000	7 Kelompok		26,000,000	10 Kelompok	40,000,000	9 Kelompok	36,000,000	55 Kelompok	144,000,000	Dinas Perikanan

Kode	Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Pada Akhir Renstra						
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Standar Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan	Persen	0%	13%	80,000,000	13%	84,500,000	22%	87,000,000	26%	#VALUE!	26%	#VALUE!	85%	#VALUE!	Dinas Perikanan
3	25	6	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pegolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis Pengolahan Produk Perikanan	Orang	0 Orang	3 Orang	50,000,000	3 Orang	52,500,000	3 Orang	55,000,000	6 Orang	85.000000	6 Orang	80.000.000	21 Orang	#VALUE!	Dinas Perikanan
						Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Uji Cepat Formalin	Lokasi	6 Lokasi	5 Lokasi	30,000,000	5 Lokasi	32,000,000	5 Lokasi	32,000,000	5 Lokasi	36.000.000	5 Lokasi	40.000.000	15 Lokasi (Kecamatan)	#VALUE!	Dinas Perikanan
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	Persen	54,89 Kg/Tahun	5%	320,000,000	11%	335,500,000	16%	451,000,000	21%	529,000,000	26%	469,000,000	26%	2,104,500,000	Dinas Perikanan
3	25	6	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) dalam rangka peningkatan konsumsi ikan	Kali	5 Kali	3 Kali	100,000,000	3 Kali	105,500,000	3 Kali	110,000,000	3 Kali	120,000,000	3 Kali	130,000,000	15 Kali	565,500,000	Dinas Perikanan
3	25	6	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jenis	4 Jenis	4 Jenis	220,000,000	4 Jenis	230,000,000	5 Jenis	241,000,000	7 Jenis	409,000,000	6 Jenis	339,000,000	7 Jenis	1,439,000,000	Dinas Perikanan
						Jumlah Pembangunan Outlet Produk Perikanan	Paket	0 Paket	0	-	0	-	1 Paket	60,000,000	0	-	0	-	1 Paket	60,000,000	Dinas Perikanan
						Jumlah Rehabilitasi Pasar Ikan	Unit	2 Unit	0	-	0	-	1 Unit	40,000,000	0	-	0	-	1 Unit	40,000,000	Dinas Perikanan
						JUMLAH				5,219,584,312		5,225,023,481		5,230,473,528		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERIKANAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, serta Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Dinas Perikanan menyelenggarakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perikanan dalam 5 tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mukomuko. Untuk data indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 pada halaman Bab VII-2.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap	50 Kelompok	33.54%	37.41%	38.70%	40%	42.58%	42.58%
			Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan Ikan Sesuai Standar	50 Unit	10.88%	14.51%	18.14%	20.31%	23.22%	23.22%
			Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan kecil yang di Tingkatkan Keterampilannya	0 Orang	2.95%	4.93%	7.39%	9.86%	12.32%	12.32%
			Persentase Nelayan yang Mempunyai Kartu Kusuka	400 Orang	40.00%	48.00%	57.60%	75.00%	95.00%	95.00%
			Persentase Perkembangan Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap	45 Kelompok	41.93%	54.83%	70.96%	85.16%	100%	100%
			Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin	0	%	%	22%	33%	44%	44%
			Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya	69288 m2	2%	5%	8%	11%	14%	14%
			Persentase Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Benih Ikan Unggul	280 RTP	19%	28%	38%	49%	63%	63%
			Persentase Benih Ikan Unggul yang digunakan pembudidaya ikan	1.712.646 Ekor Benih	5%	10%	15%	20%	75%	75%
			Persentase Pembudidaya Ikan yang Terpenuhi Kebutuhan Pakan Ikan Sesuai Standar	3576 Ton	5%	10%	15%	20%	75%	75%
			Persentase Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	3 Kali	33.33%	50%	66.66%	83.33%	100%	100%
			Persentase Pengolahan Hasil Perikanan	438.221 kg/tahun	18%	19%	20%	21%	22%	22%
			Persentase Pemasaran Hasil Perikanan	6.198.053 kg/tahun	18%	19%	20%	21%	22%	22%
			Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	57.77 kg/tahun	5%	11%	16%	21%	26%	26%

BAB VIII

PENUTUP

8.1 PEDOMAN TRANSISI

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko 2021-2026. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder.

Terwujudnya perencanaan pembangunan Kabupaten Mukomuko yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan revitalisasi lembaga perencana pembangunan daerah guna mendukung keberadaan Dinas Perikanan yang profesional.
2. Dengan didukung SDM yang potensial dan handal, Dinas Perikanan berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan secara akuntabel, transparan dan konsisten berlandaskan komitmen yang dibangun dan disepakati.
3. Terjalinnnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko terutama pada akhir periode Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.

8.2 KAJIDAH PELAKSANAAN

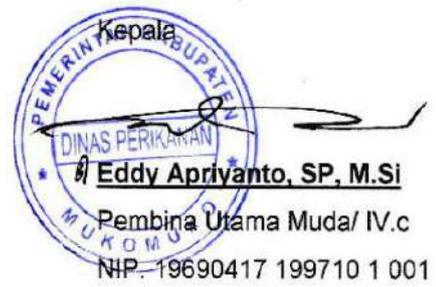
Rencana Strategis tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Perikanan sebagai lembaga perencana pembangunan daerah yang profesional dapat terus ditingkatkan. Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko 2021-2026 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya
2. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko 2016-2021 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-

program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Kepala



Eddy Aprivanto, SP, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19690417 199710 1 001